



KEMENTERIAN KEUANGAN

RAPBN 2019



APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui
Pembangunan Sumber Daya Manusia

**Rapat Kerja
Badan Anggaran DPR RI**

4 September 2018



Pokok Bahasan

1 Kerangka Ekonomi Makro 2019

2 Postur RAPBN 2019



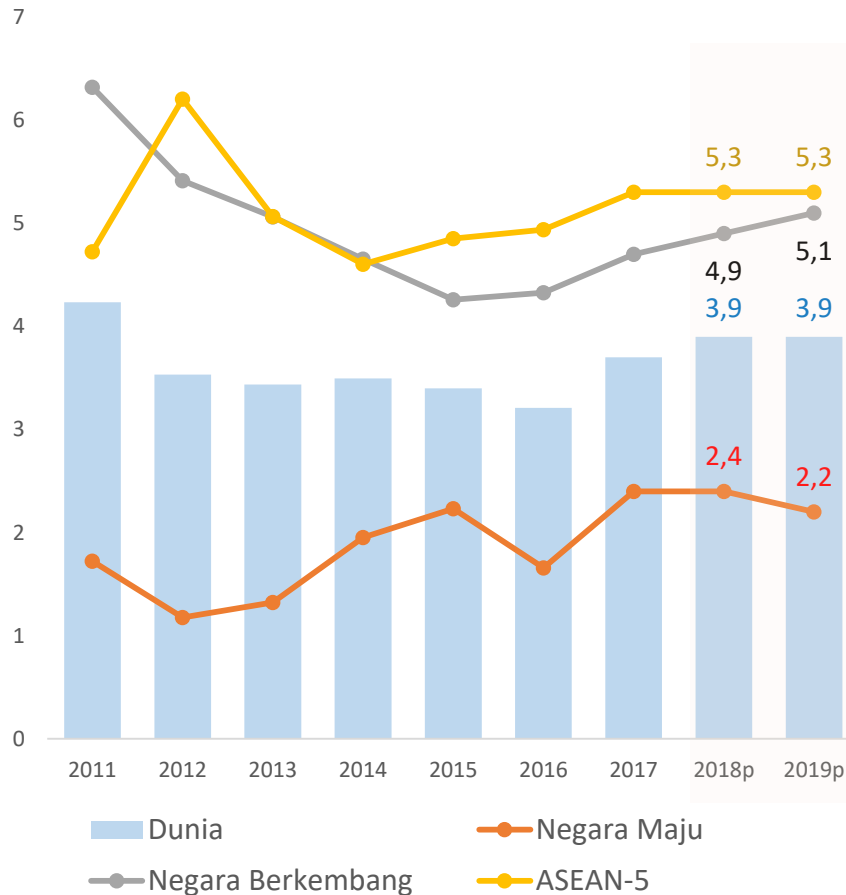
1 Kerangka Ekonomi Makro 2019



PEREKONOMIAN GLOBAL MENGALAMI PEMULIHAN SEJAK TAHUN 2017, NAMUN RISIKO TETAP TINGGI

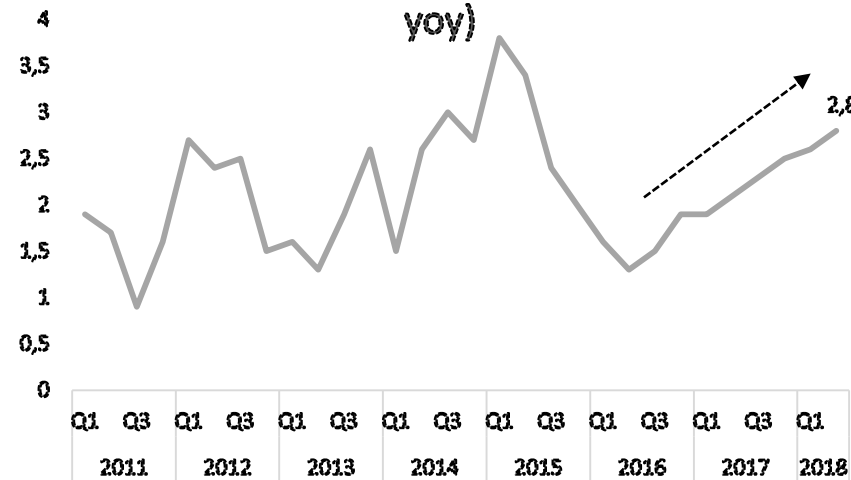
Normalisasi kebijakan moneter yang diterapkan AS membawa risiko pada pembalikan arus modal ke AS dan penguatan dolar

Proyeksi Pertumbuhan Global (% , yoy)



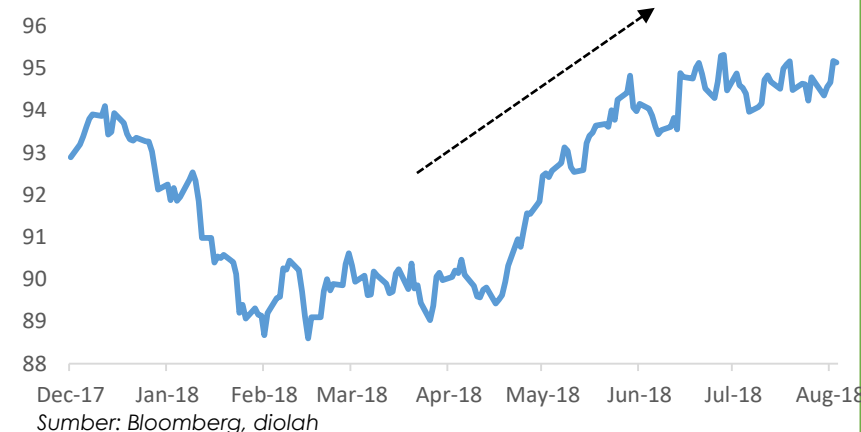
Sumber: Data IMF Juli 2018, diolah

Pertumbuhan PDB AS Triwulanan (% yoy)



Sumber: Bloomberg, diolah

Dollar Index

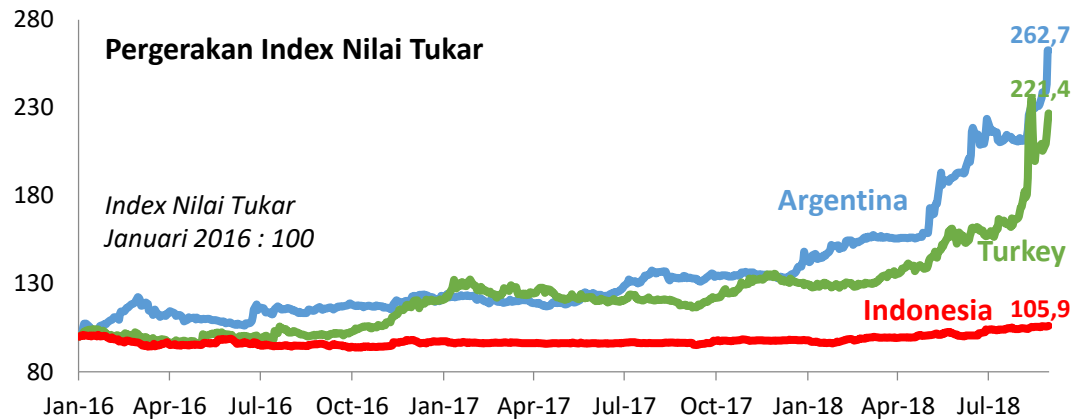


Sumber: Bloomberg, diolah

- Perekonomian global mengalami perbaikan dengan AS menjadi salah satu motor utama
- Perbaikan ekonomi AS → normalisasi kebijakan moneter → kenaikan imbal hasil → pembalikan modal ke AS → penguatan dolar AS.
- Beberapa risiko dan tantangan bagi perekonomian global ke depan:
 - Tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS
 - Moderasi Tiongkok
 - Proteksionisme
 - Perang Dagang AS-Tiongkok
 - Ketegangan geopolitik
 - Perubahan iklim/cuaca ekstrem

KONDISI ARGENTINA DAN TURKI MENGALAMI TEKANAN

Selama tahun 2018, nilai tukar Argentina telah terdepresiasi **109,4%** dan Turki **75,5%**

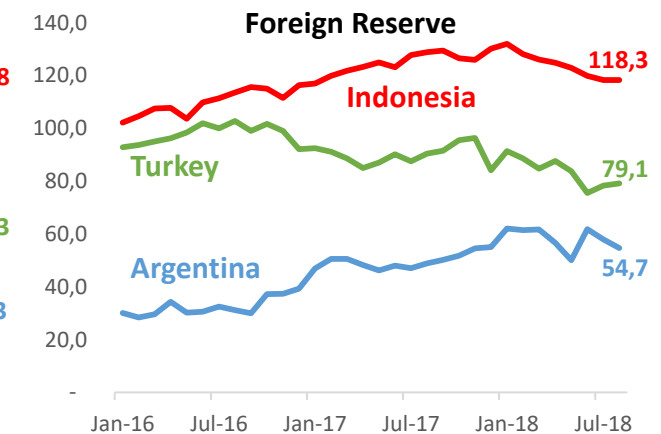
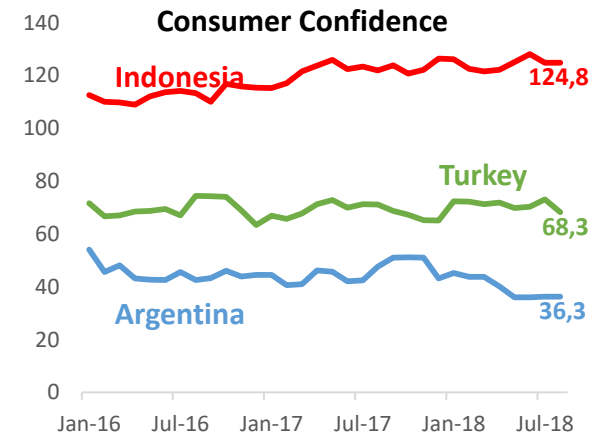
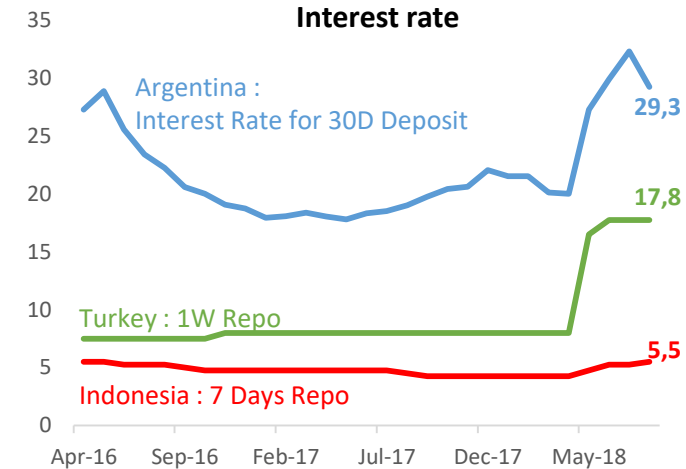
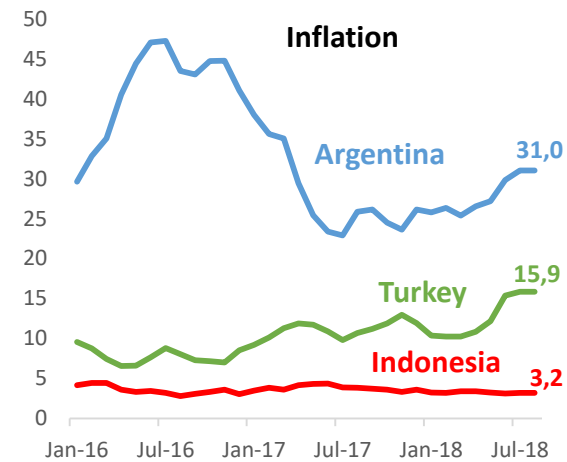


ARGENTINA

- Pengelolaan inflasi yang kurang *prudent* menyebabkan Inflasi meningkat secara tajam di Argentina dan memicu tekanan lebih dalam kepada perekonomian. Kenaikan inflasi salah satunya dikarenakan upaya mencetak uang dari Pemerintah Argentina untuk membiayai defisit anggaran
- Sebagian besar belanja pemerintah Argentina dihabiskan untuk Subsidi
- Kenaikan suku bunga acuan 20 bps ke 60% dari 45% dengan tujuan mengendalikan inflasi sebesar 25% dan depresiasi Peso.
- Kondisi iklim (kemarau) telah mempengaruhi sektor pertanian yang menjadi sektor utama Argentina
- Telah meminta bantuan kepada IMF sejumlah 50 Billion. Namun hal ini akan diikuti dengan permintaan pengetatan anggaran (*Austerity Measures*).

TURKI

- Kondisi politik dan perdagangan memberikan tekanan pada perekonomian Turki.
 - Tekanan perdagangan antara lain karena penerapan tarif tambahan untuk ekspor Turki ke AS (Steel & Aluminium)
- Adanya potensi penurunan kepercayaan independensi Bank Sentral Turki.
- Terdapat potensi Turki akan melakukan *Capital Control* untuk mengatasi tekanan Nilai Tukar nya karena tidak mau menerima bantuan IMF



Kondisi yang terjadi di Argentina dan Turki tidak berpengaruh secara langsung kepada Indonesia karena tingkat hubungan bilateral (perdagangan) relatif kecil. Namun, kondisi tekanan pada Argentina dan Turki dapat mempengaruhi persepsi risiko pada investor terhadap negara berkembang (*emerging market*). Sehingga, Indonesia perlu terus memperhatikan kondisi pergerakan aliran modal.

PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2019 DIPERKIRAKAN MENCAPAI 5,3 PERSEN

Masih tingginya risiko ketidakpastian di 2019 mendorong pemerintah melakukan penguatan fundamental dan stabilisasi ekonomi untuk memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan

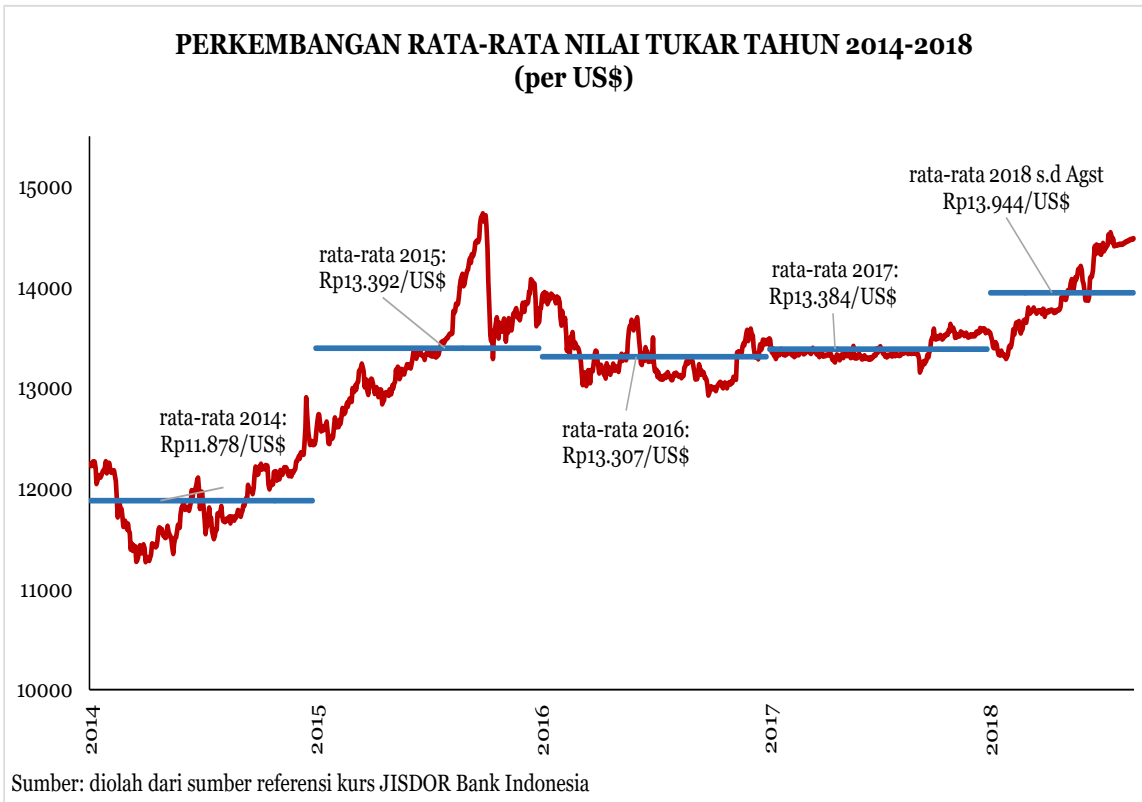
Pertumbuhan	2017	2018 <i>Outlook</i>	APBN 2019
Konsumsi RT & LNPRT	5,0	5,1	5,1
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,2	5,4
PMTB	6,2	6,9	7,0
Ekspor	9,1	7,2	6,3
Impor	8,1	11,5	7,1
PDB	5,1	5,2	5,3

Perkiraan Oleh Berbagai Institusi (%)		
Institusi	2018	2019
World Bank (Juni 18)	5,1	5,2
Consensus Forecast (Agus 18)	5,2	5,3
OECD (Mei 18)	5,3	5,4
ADB (Juli 18)	5,2	5,3
IMF (April 18)	5,3	5,5

- Penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi.
- Pemilu diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, organisasi sosial dan partai politik serta belanja pemerintah.
- Namun demikian tahun 2019 terdapat banyak tantangan:
 1. Kebijakan suku bunga acuan atas respon kenaikan FFR
 2. Keberlanjutan *Trade war* antara US dan Tiongkok
 3. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang tetap dan perkiraan pertumbuhan volume perdagangan yang sedikit turun
 4. Tahun pemilu dimana terdapat tendensi investor untuk *wait and see* setelah hasil Pemilu
- Diperlukan dorongan kebijakan fiskal dalam menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di tengah pencapaian *stability over growth*
 1. Dengan adanya risiko perang dagang, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan.
 2. Pengembangan industri hulu yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.
 3. Perbaikan iklim investasi yang berorientasi ekspor dan peningkatan daya saing untuk memperbaiki struktur transaksi berjalan.

NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS TAHUN 2019 DIPERKIRAKAN PADA KISARAN RP14.400/US\$

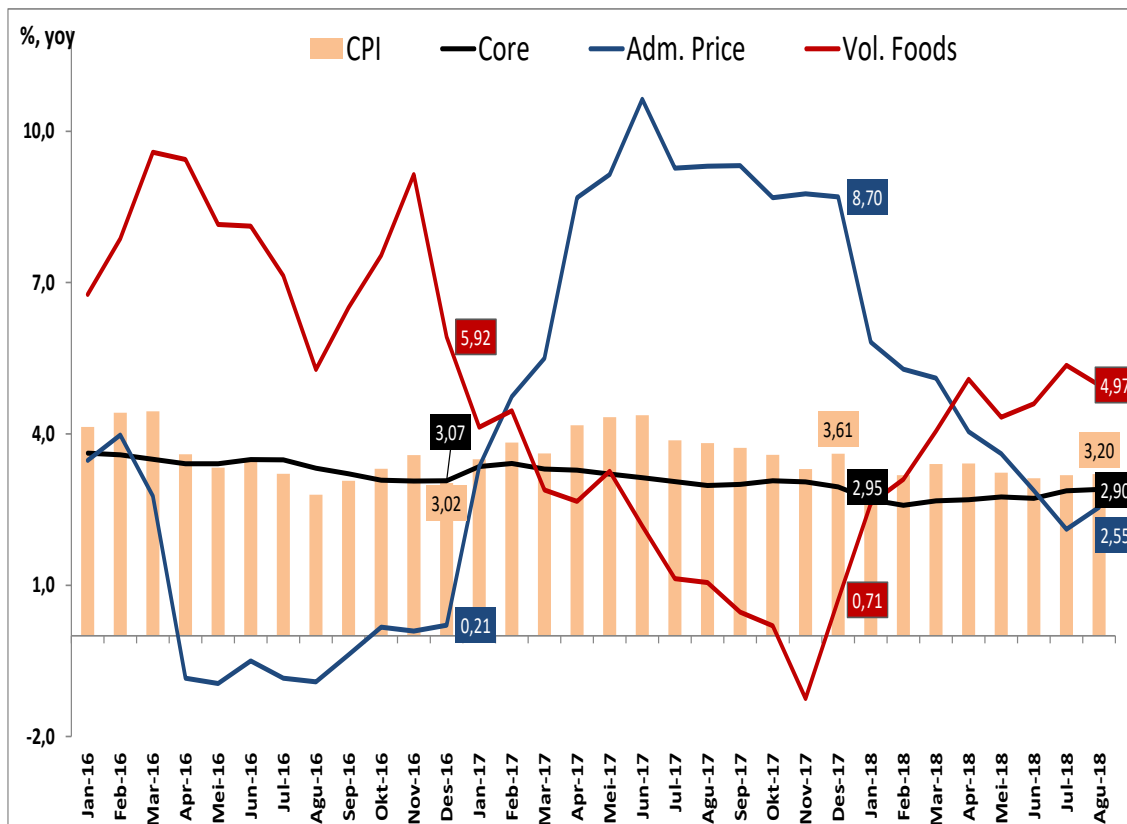
Perkembangan pasar keuangan global dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mancanegara, termasuk Rupiah. Di tahun 2019, dampak kebijakan normalisasi moneter Amerika dan perang dagang, masih akan menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi aliran modal antar negara dan nilai tukar. Namun perlu diperhatikan bahwa, dinamika global yang terjadi beberapa tahun terakhir telah membawa keseimbangan baru (*new normal*) yang juga berdampak pada keseimbangan nilai tukar Rupiah. Pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi dan menjaga stabilitas untuk mengatasi tekanan-tekanan terhadap pelemahan rupiah yang lebih dalam.



- **Kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih bergejolak di tahun 2019**
 - ✓ Perbaikan ekonomi AS → normalisasi kebijakan moneter AS
 - ✓ Fiskal ekspansif AS → peningkatan defisit → kenaikan *yield* US *T Bills*
 - ✓ Kebijakan perdagangan proteksionis
 - ✓ Kenaikan harga minyak dunia, permasalahan geopolitik
- **Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah perlu didukung oleh :**
 - ✓ **Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat** (inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang sehat, serta peningkatan peringkat utang dan EODB)
 - ✓ **Kebijakan stabilisasi nilai Rupiah** secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia didukung cadangan devisa yang kuat
 - ✓ Penguatan koordinasi kebijakan terus berlangsung dalam rangka memperbaiki stabilitas makroekonomi, termasuk koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valuta asing di antara BUMN
- **Masih berlangsungnya kebijakan suku bunga rendah di Eropa dan Jepang mengimbangi potensi *capital outflows* lanjutan**

LAJU INFLASI TAHUN 2019 DIPERKIRAKAN MENCAPAI 3,5 PERSEN

Upaya menjaga daya beli masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini menjaga laju inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah menjadi salah satu fokus program kerja Pemerintah yang utama. Strategi ini diterjemahkan melalui upaya pengendalian inflasi pada sasaran yang ditetapkan ($3,5 \pm 1,0\%$) yang didukung langkah-langkah perbaikan kapasitas produksi, terjaganya pasokan dan distribusi, perbaikan tata niaga dan struktur pasar yang lebih efisien. Secara khusus pemerintah juga akan memfokuskan upaya peningkatan produktivitas pertanian dan kebijakan harga energi domestik yang fleksibel dan tepat dengan tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan.

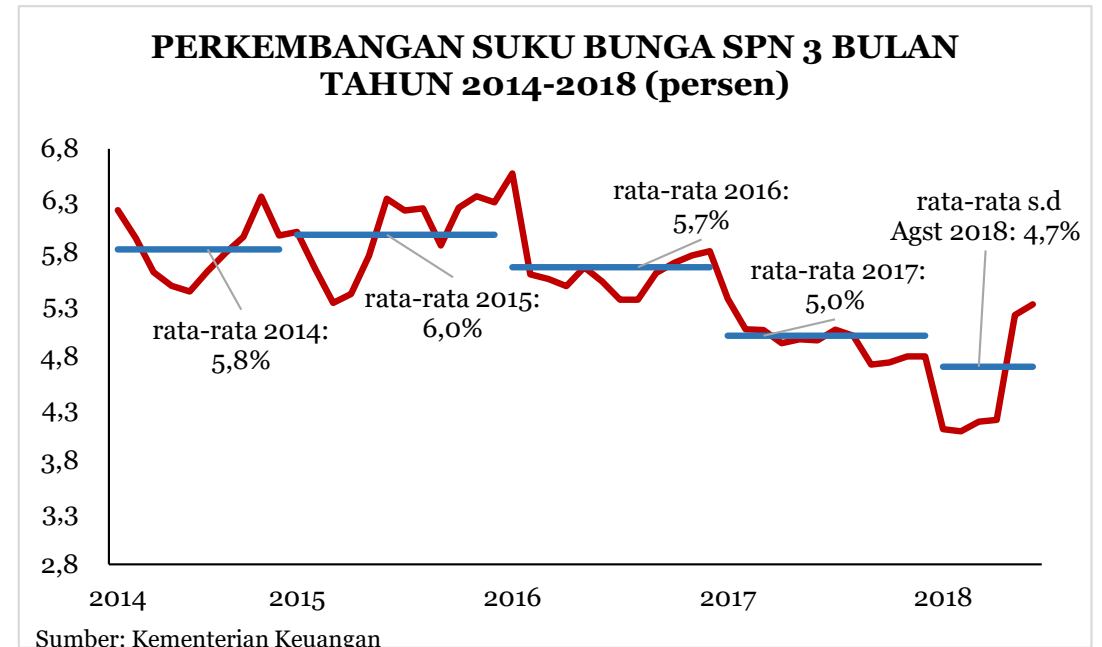


- Laju inflasi dapat terus terjaga dengan tren menurun, khususnya didukung oleh tren inflasi inti yang terus menurun dan stabil di tingkat yang rendah.
- Sumber tekanan terutama berasal dari komponen *volatile food*, khususnya bahan pangan, walaupun volatilasnya semakin menurun dari tahun ke tahun.
- Pengelolaan kebijakan harga energi saat ini mampu menurunkan tekanan *administered price*, namun tetap perlu diwaspadai risiko dan tekanan di periode ke depan.
- Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan $3,5 \pm 1,0\%$, dan terus menurun dalam jangka menengah untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat.
- Strategi dasar adalah dengan menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan dan permintaan barang, kelancaran distribusi, perbaikan efisiensi pasar, serta didukung upaya pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat
 - ✓ Pembangunan infrastruktur, prasarana produksi (khususnya pertanian), dan jalur distribusi
 - ✓ Perbaikan koordinasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi
 - ✓ Penguatan hukum untuk mengatasi distorsi pasar dan mendorong efisiensi

TINGKAT SUKU BUNGA SPN 3 BULAN DIPERKIRAKAN SEBESAR 5,3 PERSEN

Kelanjutan normalisasi kebijakan moneter AS berpotensi meningkatkan tingkat suku bunga global termasuk di Indonesia. Pengelolaan APBN dan Kebijakan Fiskal yang sehat akan menjadi bagian strategi penting dalam strategi pembiayaan pembangunan. Pengembangan pasar dan investor domestik serta instrumen utang dalam rupiah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam strategi ini. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan investor dan risiko tekanan eksternal, serta mendorong efisiensi pasar domestik dan pengelolaan pembiayaan fiskal, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi kegiatan pembangunan.

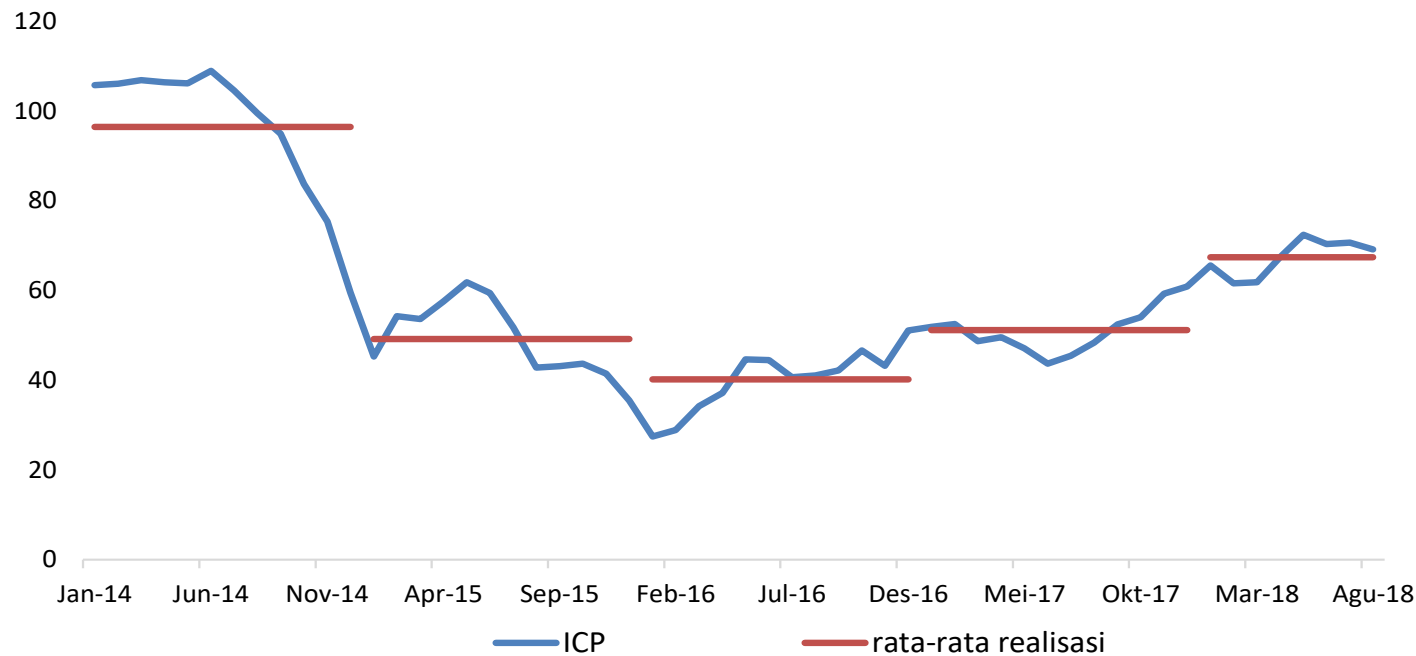
- Risiko tekanan terhadap suku bunga SPN 3 bulan masih akan berlanjut di 2019
 - ✓ antisipasi kenaikan suku bunga acuan AS lebih tinggi dari yang diperkirakan.
 - ✓ peningkatan tingkat suku bunga obligasi pemerintah AS.
- *Yield* rata-rata SPN 3 bulan saat ini masih cukup rendah, namun terdapat kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut masih terkendali didukung oleh kuatnya fundamental ekonomi, diantaranya ditunjukkan oleh perbaikan peringkat utang Indonesia serta terkendalinya inflasi domestik.
- Peningkatan daya serap pemodal domestik didukung oleh masih tingginya tingkat likuiditas perbankan serta penilaian positif atas kebijakan *front loading* dan *shortening duration*.
- Pemerintah tetap dan akan terus memperhatikan *cost and benefit* yang akan timbul terhadap beban pembayaran bunga.
 - ✓ Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan kebijakan strategis dan produktif, seperti pembiayaan infrastruktur.
- Pemerintah akan terus mengelola APBN dan fiskal pada tingkat yang aman, dengan tingkat defisit yang terukur, → **stimulus yang cukup bagi perekonomian** namun **tetap menjaga keberlangsungan fiskal** ke depan.



HARGA MINYAK MENTAH (ICP) TAHUN 2019 DIPERKIRAKAN MENCAPAI US\$70/BAREL

Harga minyak mentah dunia diperkirakan masih mendapat risiko tekanan akibat ketegangan geopolitik di beberapa negara penghasil minyak, sentimen pemangkasan produksi OPEC dan sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela. Pemerintah akan terus mewaspadai perkembangan harga minyak dunia dan menyusun strategi kebijakan fiskal yang tepat dengan mempertimbangkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.

Perkembangan ICP, 2014-2018 (US\$/barel)



- ICP bergerak seiring dengan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia, terutama Brent.
- Faktor pendorong kenaikan harga adalah ketegangan geopolitik di beberapa negara penghasil minyak, sentimen pemangkasan produksi OPEC di tahun 2018, dan sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela.
- Faktor penghambat kenaikan harga, a.l. ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi oleh OPEC dan Rusia, penggunaan energi alternatif dan peningkatan produksi *shale oil*

Indikator Ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan RAPBN 2019

Mempertimbangkan perkembangan terkini kondisi ekonomi, *outlook* serta prospek ke depan

Fokus RAPBN 2019

Efisiensi dan kualitas belanja prioritas → peningkatan SDM, perlindungan sosial, daya saing, investasi, dan infrastruktur

Mobilisasi Pendapatan secara realistis
→ Pajak untuk daya saing & investasi

Kesehatan fiskal → Produktif, Efisien, Daya Tahan, dan Sustainable



Pertumbuhan Ekonomi (%)



Inflasi (% yoy)



Nilai Tukar (Rp/USD)



Suku Bunga SPN (%)



Harga Minyak (US\$/barrel)



Lifting Minyak (ribu barrel/hari)



Lifting Gas (ribu barrel/hari)

Realisasi 2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
5,1	5,2	5,3
3,6	3,5	3,5
13.384	13.973	14.400
5,0	5,0	5,3
51	70	70
804	775	750
1.142	1.116	1.250

2 Postur RAPBN 2019



RAPBN 2019

Sehat, Adil, & Mandiri



RAPBN 2019



Outlook 2018



triliun Rupiah

Defisit RAPBN tahun 2019
diarahkan semakin menurun



(297,2)
O (314,2)



1,84% PDB
O 2,12% PDB

Keseimbangan Primer menurun
semakin mendekati positif



21,7
O (64,8)

Pembiayaan Anggaran



297,2
O 314,2

a.l.

Pembiayaan
Utang 359,3
O 387,4

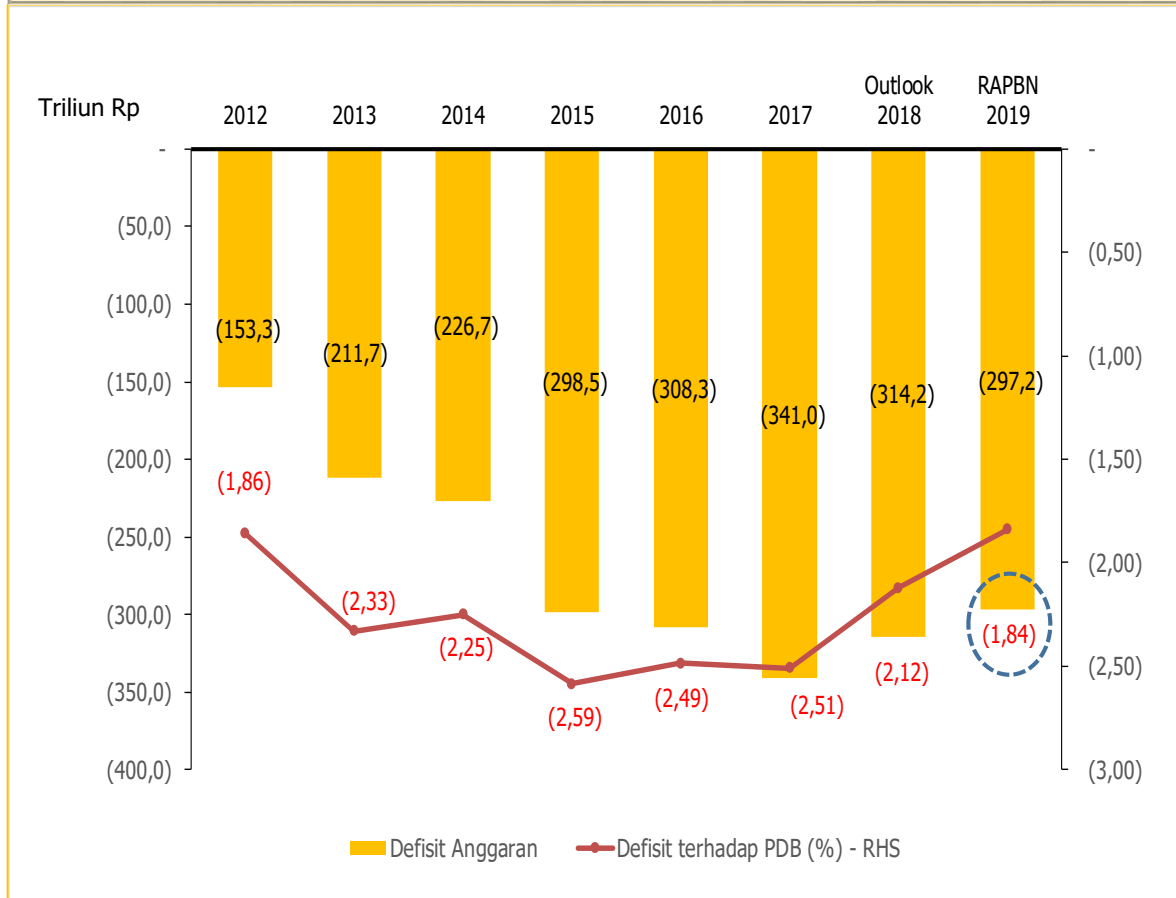
Pembiayaan
Investasi (74,8)
O (65,7)



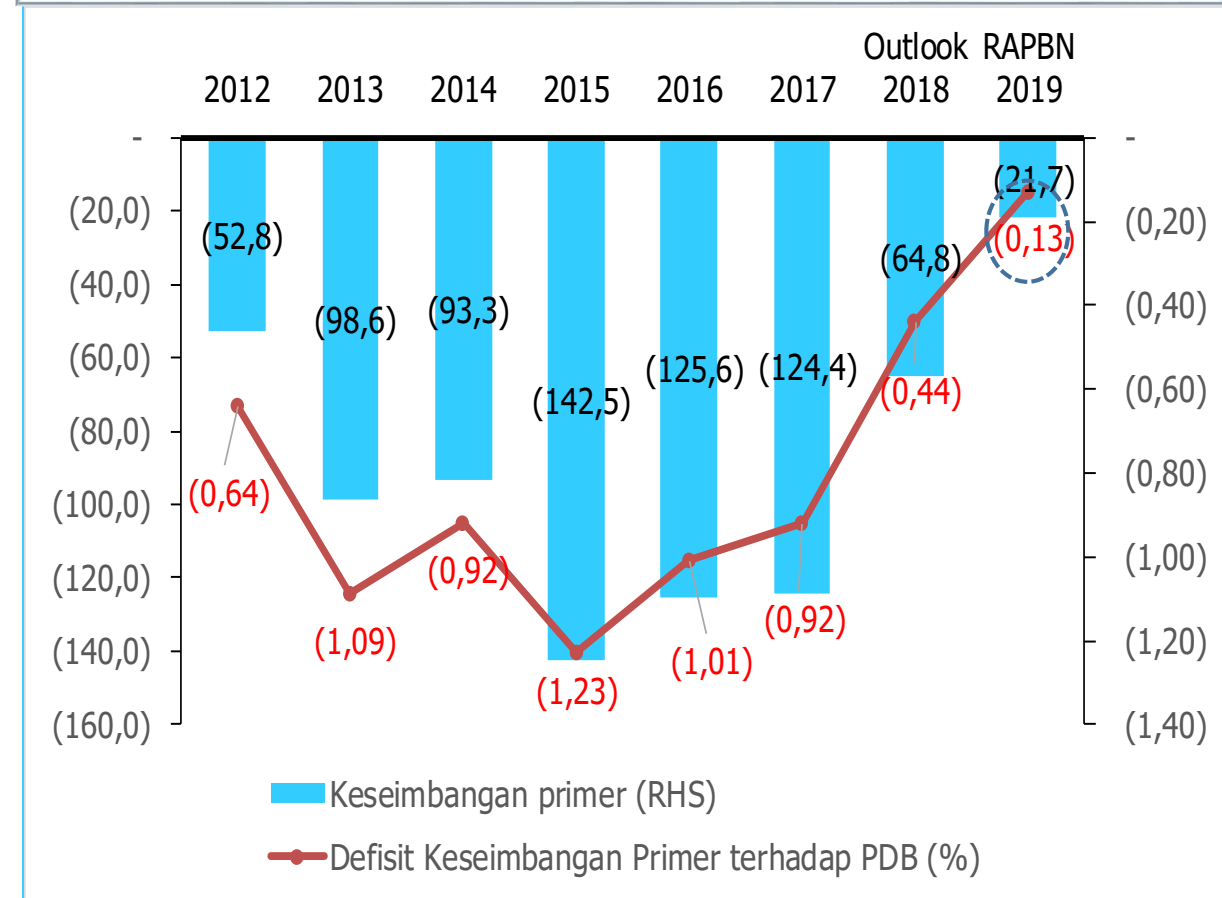
2019

APBN Sehat: Defisit APBN semakin turun, Keseimbangan Primer menuju arah positif

Defisit APBN diturunkan dibawah 2% PDB, pertama kali sejak tahun 2013



Keseimbangan Primer mendekati Rp0 → konsisten turun sejak 2015



APBN Adil: Keseimbangan antara Pembangunan Fisik dan SDM, Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pajak yang progresif

Pajak Menjadi Insentif Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat & Ekonomi



- **Kenaikan PTKP**

2013 : Rp24,3 juta

2016 : Rp54,0 juta

- **Penurunan tarif PPh**

UMKM menjadi 0,5%
(sejak Juli 2018)

Insentif Pajak bagi Dunia Usaha (tax holiday/ allowance)



- **Dilakukan *targeted***

- **Dengan Kriteria & syarat tertentu a.l :**

Industri Pionir

Mempertimbangkan nilai investasi, orientasi ekspor, & penyerapan tenaga kerja

Penguatan dan Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM



Anggaran Infrastruktur

2015:Rp256,1 2019:Rp420,5 T

Anggaran Pendidikan

2015:Rp390,1 T 2019:Rp487,9

Anggaran Kesehatan

2015: Rp65,9 T 2019:Rp122,0 T

Anggaran perlindungan sosial

2015: Rp249,4 T 2019:Rp381,0 T

Terdapat beberapa program yang beririsan

Memperkokoh keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah



Transfer ke Daerah & Dana Desa

2015
Rp623,1 T

2019
Rp832,3 T

Hampir sama

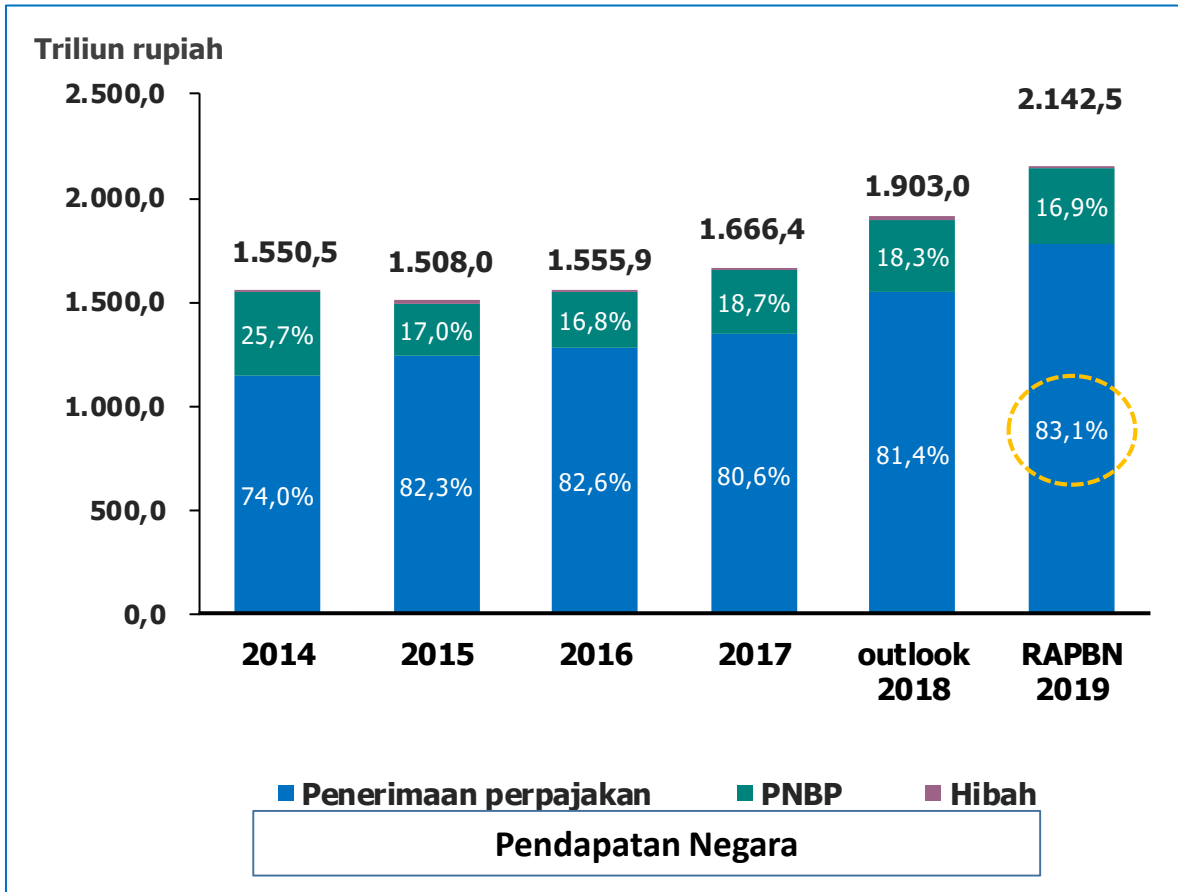
Belanja K/L

2015
Rp732,1 T

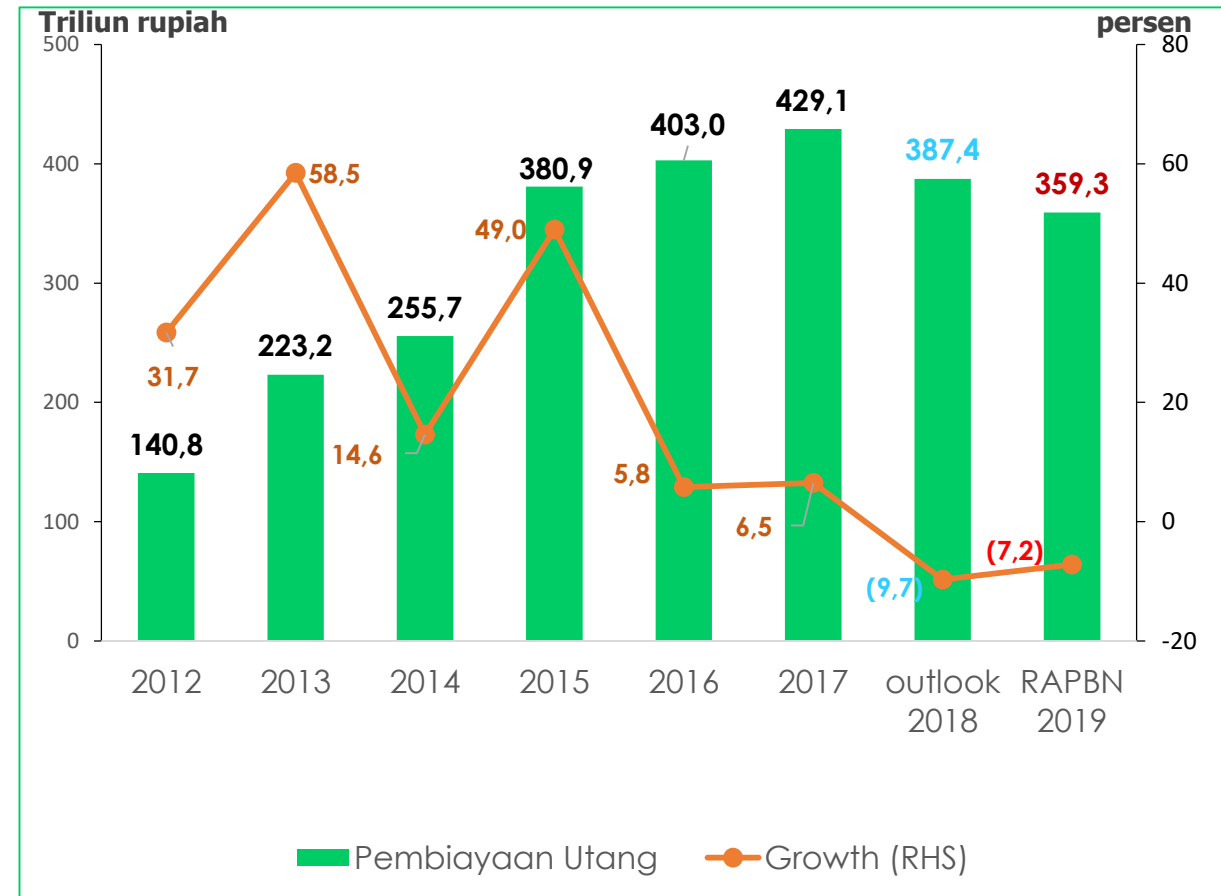
2019
Rp840,3 T

APBN Mandiri: Penerimaan Pajak Menjadi Sumber Utama Belanja Negara

Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi 83,1% (2014: 74,0%) thd pendapatan negara



Pembiayaan utang semakin menurun



RAPBN 2019 untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fokus Belanja 2019

1. Peningkatan **investasi di bidang pendidikan** untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memperkuat PIP, BOS, beasiswa, vokasi, dan mempercepat rehab sekolah.
2. Penguatan **program perlindungan sosial** melalui perluasan JKN, serta peningkatan besaran manfaat PKH.
3. Menjaga kesinambungan **pembangunan infrastruktur** untuk pemerataan pembangunan.
4. Memperkuat **reformasi birokrasi** dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi.
5. Mensukseskan pelaksanaan **pesta demokrasi**.



Fokus

Perbaiki

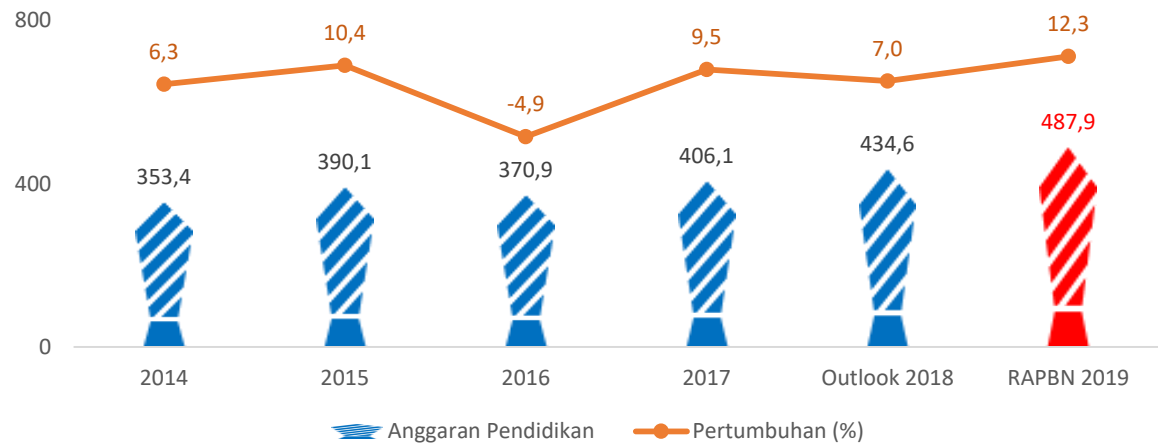
Peningkatan kualitas belanja didukung penguatan akuntabilitas

1. **Penguatan perencanaan penganggaran** yang didukung monev yang komprehensif dan terkoordinasi
2. **Efisiensi** melalui penghematan dan pembatasan kendaraan bermotor, gedung, dan perjalanan dinas
3. Pengelolaan yang lebih **akuntabel** (sejak 2016, LKPP mendapat predikat WTP)

Belanja Pemerintah dalam Tahun 2019 difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, diikuti dengan penguatan *value for money*

 Pembangunan SDM	 Penyelesaian Infrastruktur	 Perlindungan Sosial	 Pelaksanaan Agenda Demokrasi	 Birokrasi yang efektif dan efisien	 Antisipasi ketidakpastian
Anggaran Pendidikan Rp487,9 T Anggaran Kesehatan Rp 122 T Bidang Pendidikan, a.l. untuk: 20,1 juta siswa penerima KIP 471,8 ribu mahasiswa penerima beasiswa Bidik misi - Penguatan pendidikan Vokasi - Percepatan pembangunan sarpras Bidang Kesehatan, a.l. untuk: - Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN)	Anggaran Infrastruktur Rp420,5 T Pembangunan /rekonstruksi/ pelebaran Jalan 2.007 km Pembangunan dan rehabilitasi jaringan Irigasi 162 ribu Ha Rasio Elektrifikasi 99,9 % rumah susun dan khusus 10.742 unit Bendungan 48 unit Pembangunan Jalur kereta api (tahap awal, penyelesaian, peningkatan) 415,2 km'sp	Anggaran Perlindungan Sosial Rp381,0 T PKH → 10 juta Keluarga dengan peningkatan Manfaat Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) → untuk 15,6 juta keluarga dengan perbaikan penyaluran Subsidi Bunga: - Kredit usaha kecil dan mikro - Perumahan	Anggaran Hankam Rp220,5 T Anggaran Pemilu Rp 24,8 T Agenda Demokrasi - Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Anggota Legislatif 2019 - Pengamanan Pemilu 2019 Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan Keamanan penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik	Anggaran Rp368,6 T Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kesejahteraan aparatur dan pensiunan	Anggaran Rp38,6 T Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, keamanan

Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20% APBN, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



	2015	2019	
● Melalui Belanja Pusat	141,9	158,0	Triliun Rupiah
Kemendikbud	56,8	36,0	
Kemenag	45,3	51,9	
Kemenristekdikti	30,7	40,2	
Kemen PUPR	-	6,6	
● Melalui Transfer	248,2	309,9	
DAU*)	135,0	168,6	
DAK Fisik	9,4	18,7	
DAK Non Fisik	97,4	117,7	
● Melalui Pembiayaan	-	20,0	
(Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)			

*) perkiraan pemanfaatan DAU untuk gaji dan tunjangan guru, serta program pendidikan lainnya (mulai 2019 DTU)

Beberapa perbaikan yang dilakukan

Peningkatan Kualitas



- Peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan redistribusi guru antardaerah
- Peningkatan efektivitas BOS
 - Pengalihan BOS dari Kemendikbud ke DAK (2016)
 - BOS berdasarkan kinerja (2019)



Perbaikan Akses

- Program Indonesia Pintar 19-20 juta siswa/tahun → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kemen PU PR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR) → 2019
- Perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi (2015: 269 rb) → (2019 : 471 rb)
- Penguatan LPDP dalam bentuk SWF selaku pengelola dana abadi Pendidikan mulai tahun 2017 serta telah dan akan menyalurkan 27 ribu beasiswa.



Penguatan Sinergi

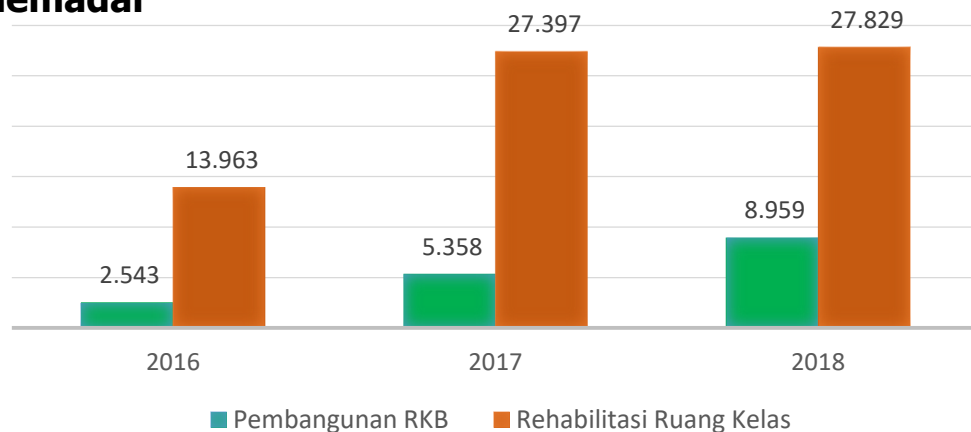
- Sinergi Penganggaran KL dan DAK
- Enforcement* pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda
- Link and match* pendidikan vokasi

CAPAIAN DAN TARGET OUTPUT DAK PENDIDIKAN

Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia

DAK FISIK:

Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai



Naik 114,9%
Rp8,7 T (2018)
Rp18,7 T (2019)

DAK NON FISIK:

Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru

Naik 8,8%

Rp108,2 T (2018)

Rp117,7 T (2019)

BOS : Sasaran (siswa)



2017 : 46,2 jt
2018 : 47,0 jt

Tunjangan Profesi Guru : Sasaran (guru)



2017 : 1,3 jt
2018 : 1,2 jt

BOP PAUD :

Sasaran (Peserta Didik)



2017 : 5,6 jt
2018 : 6,2 jt

Tambahan Penghasilan Guru : Sasaran (guru)



2017 : 357 ribu
2018 : 265 ribu

Tunjangan Khusus Guru : Sasaran (guru)



2017 : 41.599
2018 : 50.099

Target 2019:

1. Rehabilitasi ruang kelas 30.900 ruang
2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 7.500 ruang
3. Rehabilitasi Laboratorium 10.000 ruang
4. Rehabilitasi Perpustakaan 15.000 ruang

Target 2019:

1. BOS 48,1 jt siswa
2. BOP PAUD 7,5 jt peserta didik
3. Tunjangan Profesi Guru 1,2 jt guru
4. Tambahan Penghasilan Guru 265.448 guru
5. Tunjangan Khusus Guru 54.663 guru
6. BOP Pendidikan Kesetaraan : 925.000 Peserta Didik



Revitalisasi pendidikan Vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja

Vokasi melalui Belanja K/L	2014	2015	2019	
	4,5	6,8	17,2	Triliun Rupiah

Target 2019 *)



Kemnaker, a.l. :

- Pelatihan 235 ribu naker
- Peningkatan kompetensi 6.711 instruktur/tenaga pelatihan
- Sertifikasi 526 ribu tenaga kerja
- Magang dalam/luar negeri mandiri 203 rb orang
- 1.000 BLK komunitas/pesantren



Kemenhub, a.l. :

- Diklat vokasi di 26 lembaga diklat (491 ribu orang)



Kemenristekdikti, a.l. :

- Revitalisasi 12 Politeknik
- Bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa
- Pendidikan vokasi untuk 127,8 ribu mahasiswa



Kemendikbud, a.l. :

- 1.407 ruang praktek SMK
- BOP Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang
- Peralatan pendidikan SMK 6 ribu paket



Kemenperin, a.l. :

- Diklat Tenaga Kerja Industri Kompeten Sistem 3 in 1 (50 ribu orang)
- 28 bangunan/gedung pendidikan vokasi industri
- 1 Pusat manufaktur digital implementasi industri 4.0



Kemenpar, a.l. :

- Peningkatan kualitas Poltekpar dan kapasitas pengajar

Kebijakan

✓

Mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) → R&D swasta sekitar Rp74 T, dgn potensi **tax deductible +/- Rp18 T (tax expenditure)**

✓

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi

✓

Penyusunan Regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan (SNP)

✓

Penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi

✓

Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 Politeknik

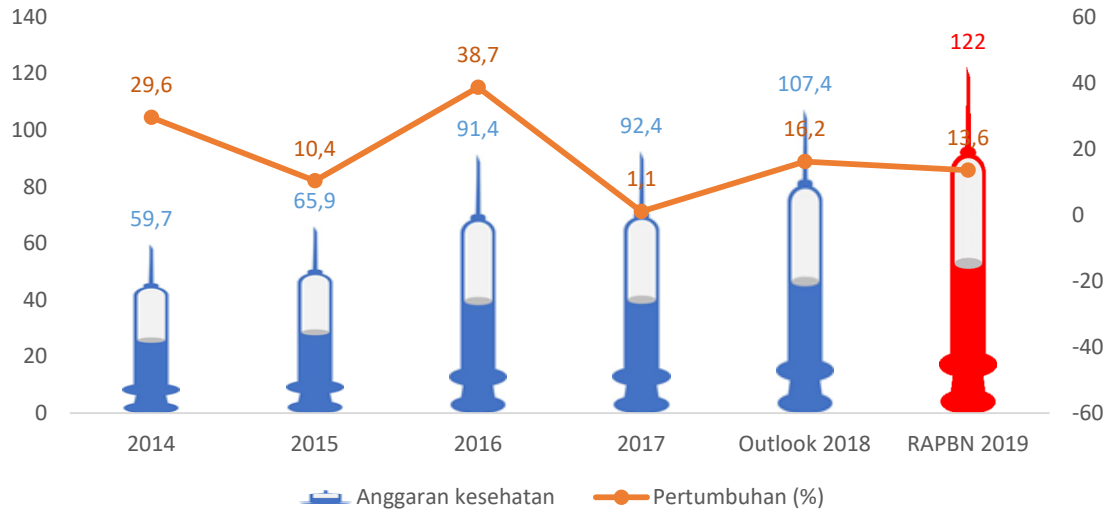
✓

Pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP

✓

Kebijakan vokasi akan dikoordinasikan Kemenaker

Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting



	2015	2019	
● Melalui Belanja Pusat	54,6	88,2	Triliun Rupiah
Kemenkes	45,9	58,7	
B POM	1,0	2,0	
BKKBN	2,2	3,8	
JKN PNS/TNI/POLRI	4,4	5,8	
● Melalui Transfer	6,3	33,7	
DAK Fisik	5,2	20,3	
BOK dan BOKB	-	12,2	

Beberapa perbaikan yang dilakukan

1. Peningkatan Kualitas

- Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan
- Peningkatan efektivitas BOK dan BOKB
 - Pengalihan BOK dan BOKB dari Kemenkes ke DAK (2016)
- Penguatan program promotive dan preventif
 - Mendorong pola hidup sehat melalui Germas
 - Peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita dan imunisasi

2. Perbaikan Akses

- Perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (2015: 86,4 juta jiwa ; 2019: 96,8 juta jiwa) → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

3. Penguatan Sinergi

- Sinergi Penganggaran KL dan DAK
- Enforcement pemenuhan anggaran kesehatan oleh Pemda
- Mendorong KPBU untuk pembangunan RS di daerah
- Penguatan upaya penanganan stunting

CAPAIAN DAN TARGET OUTPUT DAK KESEHATAN

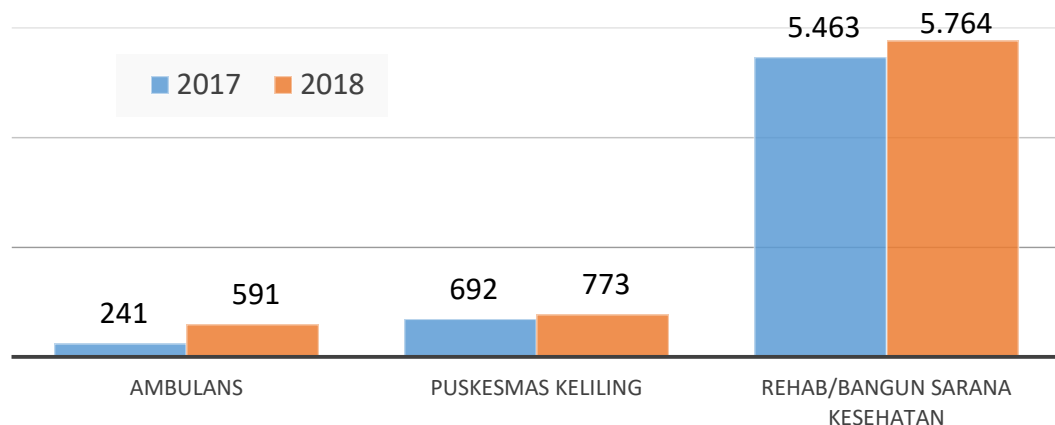
Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia

Naik 18,7%
Rp20,3 T
(2019)

Rp17,1 T
(2018)

DAK FISIK:

Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan



Target 2019

1. Puskesmas tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak **5.600 unit**
2. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat dan Vaksin esensial **95%**

Naik 31,1%
Rp12,2 T
(2019)

Rp9,3 T
(2018)

DAK NON FISIK:

Menunjang operasionalisasi layanan kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan



Sasaran (puskesmas)

2018 : 9.785

Bantuan Operasional KB



Sasaran (balai penyuluhan/ faskes)

2018 : 24.312

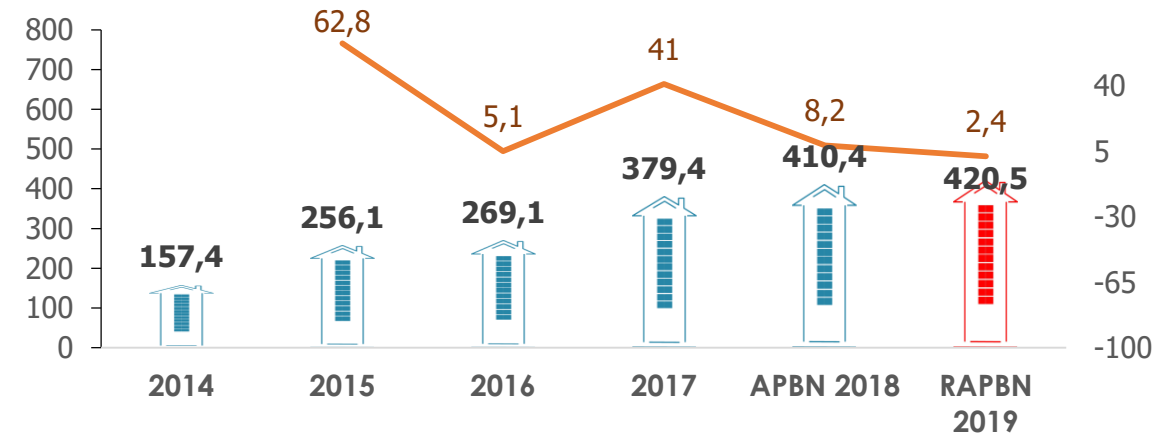
BOK dan BOKB juga ditujukan untuk
mendukung penanganan stunting

Target 2019

1. Bantuan Operasional Kesehatan : **9.825 puskesmas**
2. Bantuan Operasional KB : **30.232 balai penyuluhan/fasilitas kesehatan**

Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur

Triliun Rupiah



Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan (%)

Triliun Rupiah

	2019	2015
● Melalui Belanja Pusat	173,8	183,0
Kemen PU Pera*	108,2	107,4
Kemenhub*	38,1	44,4
*) alokasi belanja di luar belanja pegawai		
● Melalui Transfer	201,7	39,1
DAU dan DBH non earmark**	129,1	-
DAK	39,1	27,7
Dana Desa	29,2	8,3
**) pemanfaatan 25% untuk bidang infrastruktur		
● Melalui Pembiayaan	45,0	34,1
PMN	17,8	28,8
LMAN	22,0	-

Kebijakan



Peningkatan **efektivitas alokasi anggaran infrastruktur** dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur;



Fokus infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas produksi al: jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, irigasi bendungan serta embung



Mengoptimalkan peran Pemda, melalui transfer ke daerah:

- DAK untuk bidang infrastruktur seperti: jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan.
- 25 % DTU untuk infrastruktur (sejak 2017)
- Dana desa untuk mendukung infrastruktur (sejak 2015)



Mengoptimalkan peran BUMN dan Swasta

- Investasi Pemerintah (termasuk PMN) untuk mendukung infrastruktur: LMAN untuk penyediaan lahan (mulai 2016), PMN untuk penugasan pembangunan infrastruktur
- Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU, seperti VGF (mulai 2015), PDF, penjaminan, dan KPBU AP (mulai 2019).



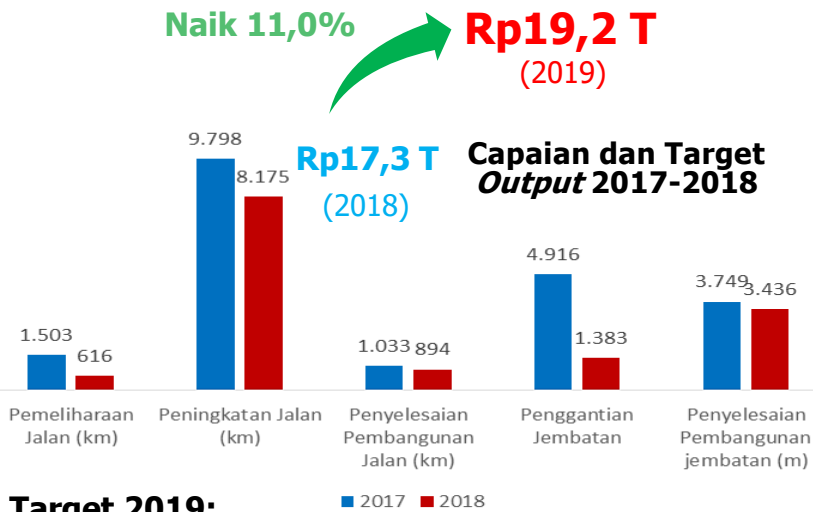
Meningkatkan **koordinasi lintas sektoral** termasuk dengan Pemda



Mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur

CAPAIAN DAN TARGET OUTPUT DAK INFRASTRUKTUR DASAR

JALAN & JEMBATAN



Target 2019:

1. Peningkatan dan penggantian: 2.089,18 km
2. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi: 26.069,57 km
3. Pembangunan: 473,75 km

Untuk mencapai target tingkat kemantapan jalan provinsi 75%, dan jalan kabupaten/kota 65%

PERUMAHAN & PERMUKIMAN



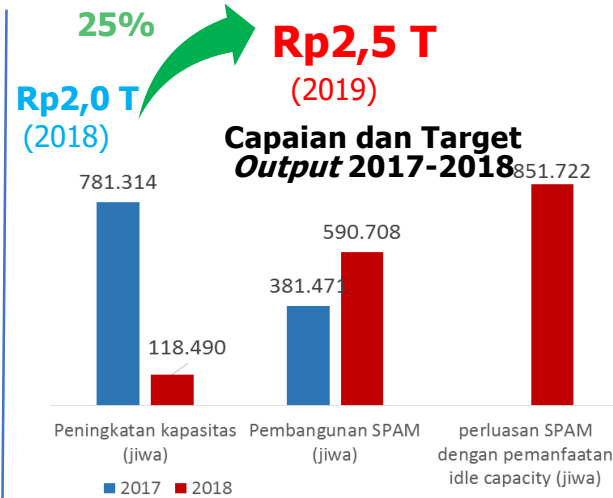
Naik 30,0%
Rp1,3 T (2019)

Rp1,0 T (2018)

Target 2019:

- Pembangunan baru 23.500 Unit
- Peningkatan kualitas 140.000 Unit
- Pembangunan rumah Khusus 500 Unit

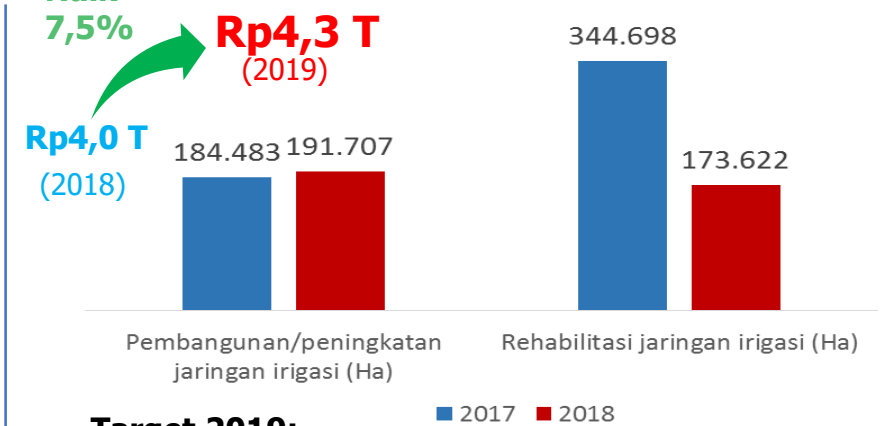
AIR MINUM



Target 2019:

- a. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk 5.531.000 jiwa.
- b. Pembangunan SPAM bagi yang belum ada layanan air minum: 9.809.800 jiwa.
- c. Penambahan kapasitas SPAM bagi 1.390.600 jiwa

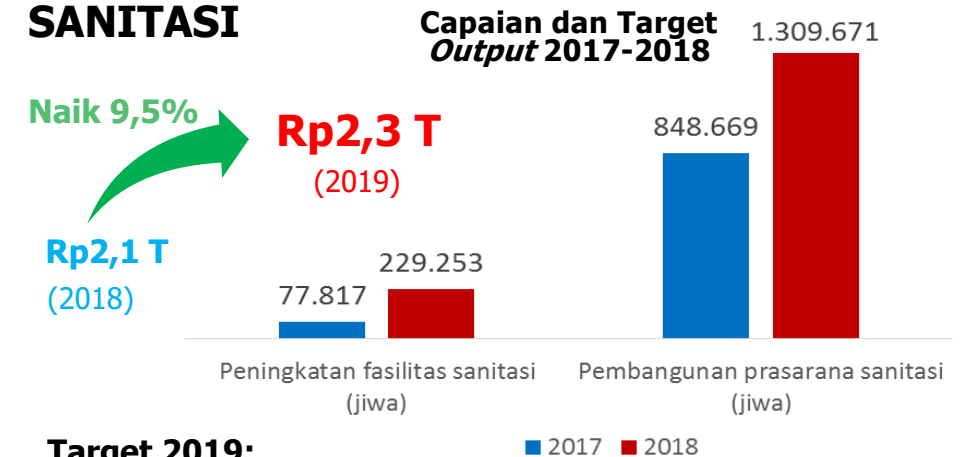
IRIGASI



Target 2019:

- a. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi 142.100 Ha.
- b. Rehabilitasi jaringan irigasi 681.500 Ha .

SANITASI



Target 2019:

- a. Peningkatan akses sarana air limbah bagi 6.443.570 jiwa.
- b. Peningkatan akses sarana persampahan bagi 131.200 jiwa.
- c. Peningkatan akses drainase lingkungan bagi 93 Ha.

Keterlibatan Peran Swasta dan BUMN dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur melalui KPBU AP pada Tahun 2019 dioptimalkan hingga Rp9,38 T



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (4 proyek)



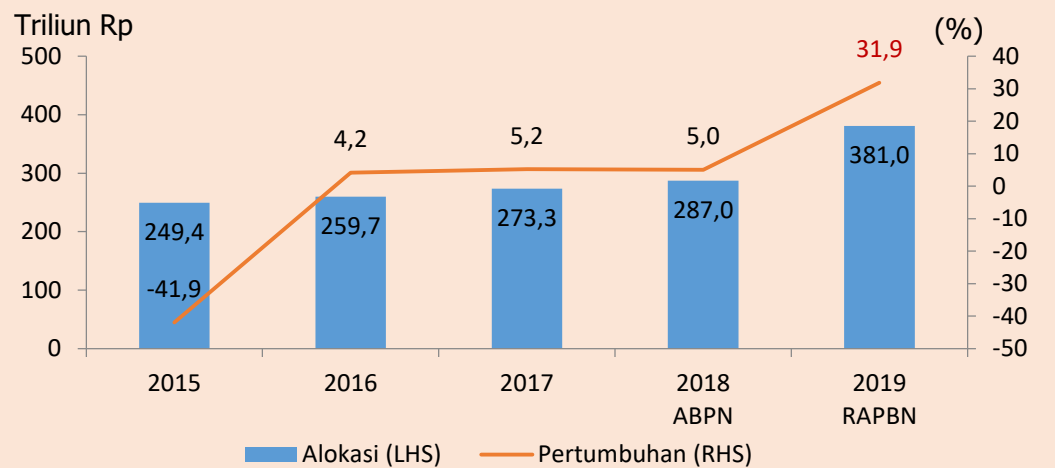
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2 proyek)



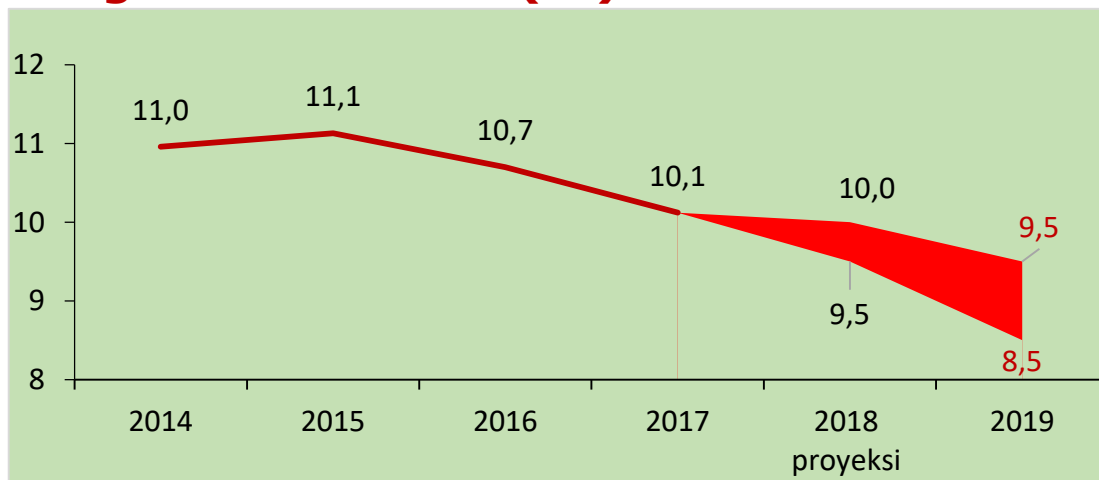
Kementerian Perhubungan (4 proyek)

Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dari Pencapaian Single Digit (9,82%) di tahun 2018 menjadi 8,5% – 9,5% di tahun 2019

Alokasi Program Perlindungan Sosial



Tingkat Kemiskinan (%)



Kebijakan

Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi **40% penduduk termiskin**



Peningkatan peserta **PBI JKN** menuju ke 96,8 juta jiwa



Memperkuat **Program Keluarga Harapan** melalui peningkatan besaran manfaat 100% bersyarat dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.



Sasaran **Bantuan Pangan non-Tunai** ditingkatkan bertahap menuju **15,6** juta keluarga penerima manfaat.



Memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil



mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- **insentif perpajakan** khusus berupa tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%,
- fasilitas **kredit usaha rakyat** melalui pemberian subsidi bunga kepada 11,8 juta debitur lama dan 4 juta debitur baru
- penyaluran **dana bergulir** untuk peningkatan akses dan penguatan modal bagi UMKM, termasuk **usaha mikro pesantren**.

Pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 sebagai bagian dari agenda demokrasi nasional

Indikator Demokrasi

	2018	2019
Indeks Demokrasi Indonesia	74,6	75
Tingkat Partisipasi Pemilih	75,1 (2014)	77,5

Alokasi Anggaran

(triliun rupiah)

2018

16,0

2019

24,8



Kegiatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019

 **KPU** → Pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 (sarpras Pemilu, Pemungutan suara, rekapitulasi suara, pendidikan Pemilu)

 **Bawaslu** → Pengawasan tahapan Pemilu dan pengembangan kelembagaan

 **MPR / DPD / DPR** → Sidang 5 tahunan, pelantikan, dan akomodasi anggota dewan baru

 **MK** → Penanganan perselisihan Pemilu

 **Kemenkominfo/RRI/TVRI** → sosialisasi Pemilu

 **Kemhan/Polri** → Pengamanan Pemilu

Arah Kebijakan

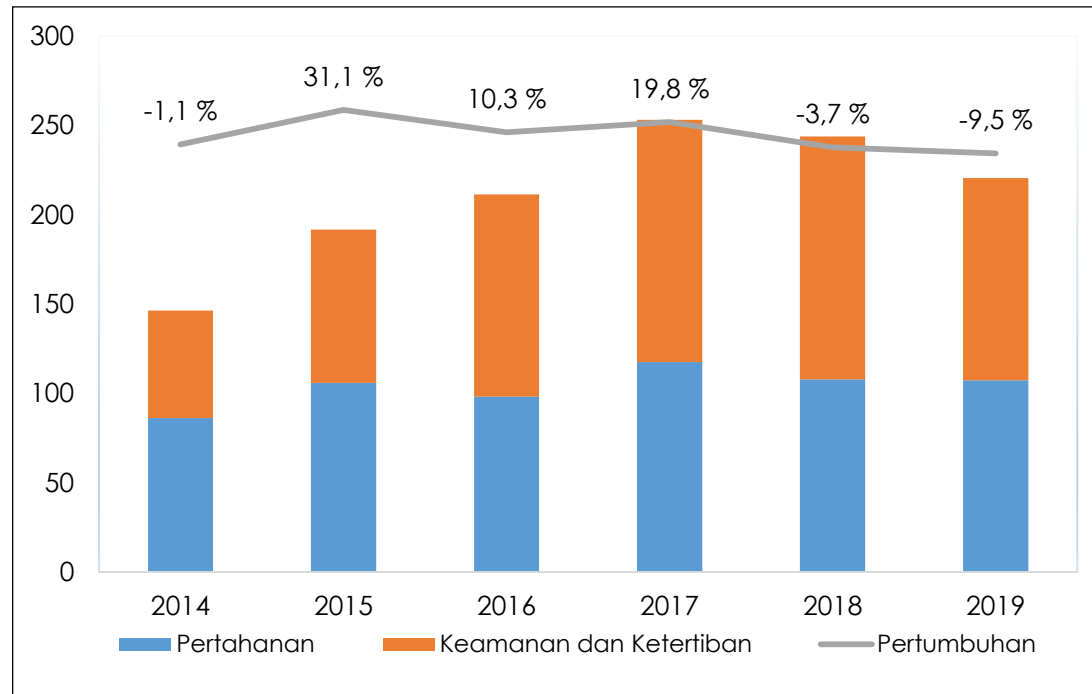
- Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi
- Menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil
- Mewujudkan birokrasi yang netral
- Melaksanakan tahapan pemilu yang aman

Menjaga kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan termasuk agenda pesta demokrasi 2019

	2015	2019
Alokasi melalui K/L, a.l	192,5	220,5
Triliun Rupiah		
Kemenhan	101,4	107,0
Polri	62,0	76,2
BIN	2,6	2,9

Catatan:

1. Merupakan angka fungsi pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan
2. Tahun 2015 diolah sesuai reklasifikasi fungsi



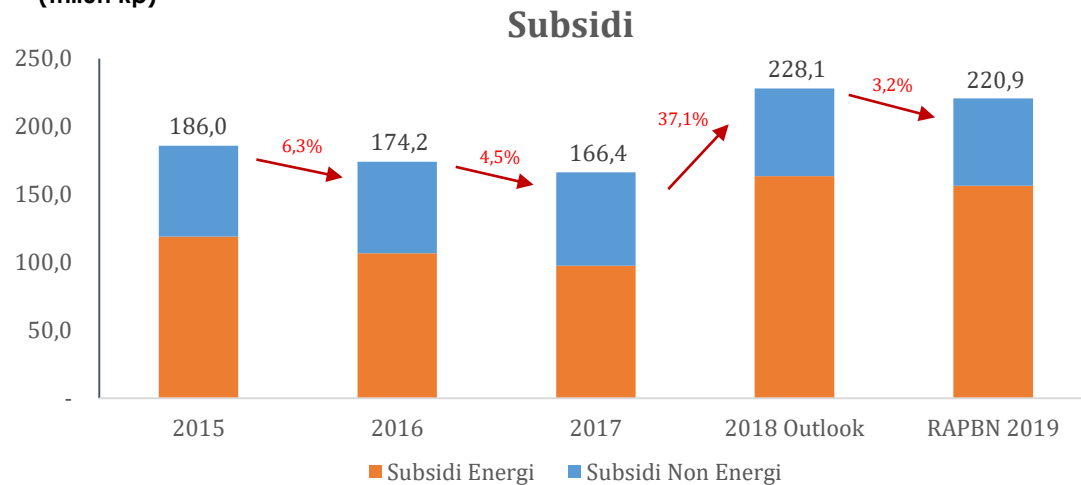
Rencana kegiatan bidang Hankam, a.l:

1. Menjaga keutuhan NKRI;
2. Pendidikan dan Pelatihan pasukan antiteror;
3. Produksi alutsista dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan;
4. Pembangunan Koarmada III dan Pasmar-3 Sorong;
5. Pengamanan kawasan perbatasan;
6. penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik;
7. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. penanggulangan narkoba;
9. pengamanan Pemilu.

Kebijakan Subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai

Melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi

(Triliun Rp)



Subsidi Energi
156,5
163,5

Subsidi BBM & LPG

100,1

- Perbaikan penyaluran untuk ketepatan sasaran
- Subsidi solar **Rp2.000**/liter
- Volume:
 - Solar **14,5** juta KL
 - Minyak tanah **610** ribu KL
 - LPG **6.978** juta Kg

Subsidi Listrik

56,5

- subsidi tepat sasaran untuk pelanggan **450 VA** dan **900 VA**
- Peningkatan rasio elektrifikasi
- Peningkatan penggunaan **energi terbarukan**

● 2019
● 2018

220,9
228,1 (triliun rupiah)



Subsidi Non-energi

64,3
64,7

antara lain:



Subsidi Pupuk
29,5

- Penyempurnaan data penerima dengan NIK.
- volume pupuk **9,55** juta ton



PSO
6,8

- Pelayanan publik
- LKBN Antara, PT Peln, PT KAI
- Pemberian subsidi LRT Jabodebek dalam rangka percepatan penyelenggaraan KA Ringan

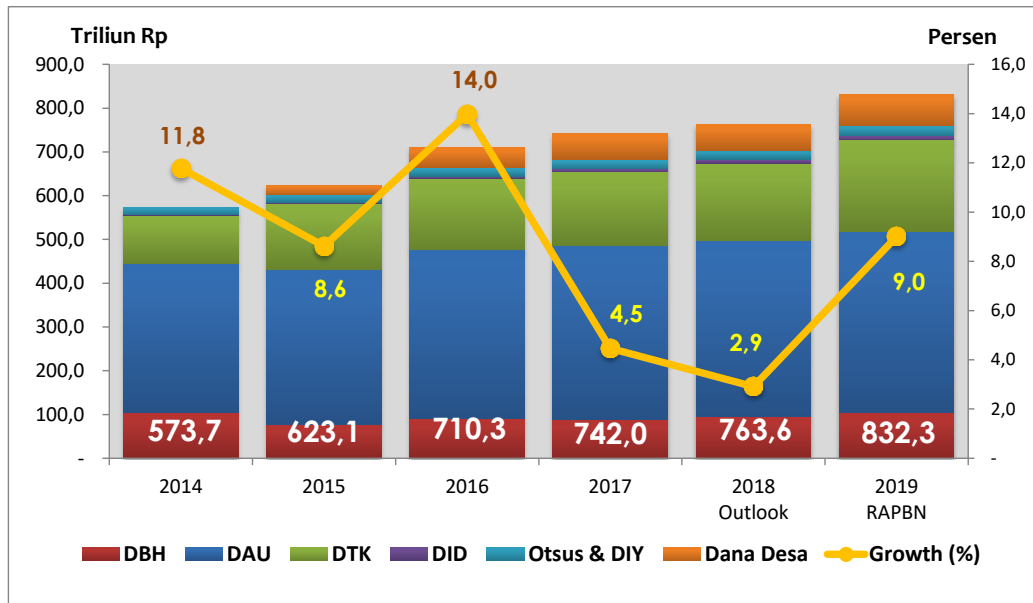


Subsidi Bunga Kredit Program
16,7

- Target penyaluran KUR **Rp120 T** dengan suku bunga **7%** yang diperuntukkan pembiayaan sektor produktif bagi UMKM dan TKI
- Subsidi kredit perumahan bagi MBR dengan penerbitan sebanyak **100 ribu** unit

Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

untuk meratakan pembangunan ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa



- **DAU 2019 bersifat final** untuk **meningkatkan** kepastian sumber pendanaan APBD dan afirmasi daerah berciri kepulauan
- Pengalokasian **BOS berbasis kinerja** pada tahun 2019

- Percepatan **penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil** dan *sharing* beban bila harga migas naik diikuti kenaikan subsidi
- Dana Desa terus meningkat dengan **penyempurnaan program prioritas** dan **fokus untuk mendukung penanganan kemiskinan** (skema padat karya tunai) dan pemberdayaan desa
- Pengalokasian **DAK Fisik berdasarkan proposal daerah (*proposal based*)** mulai tahun 2016
- Penyaluran TKDD (Dana Transfer Khusus dan Dana Desa) **berbasis kinerja penyerapan dan capaian output** dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sejak 2017
- Memperkuat ***Taxing Power*** daerah, melalui pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah pada tahun 2014

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita

832,3
763,6

Triliun Rupiah
● 2019
● 2018

Transfer ke Daerah 759,3 703,6

Dana Alokasi Khusus Fisik 77,2 59,3

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
- *Money follow* program
- Peningkatan alokasi untuk infrastruktur pendidikan
- Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan
- Penambahan subbidang GOR dan perpustakaan daerah

Dana Alokasi Khusus Nonfisik 131,2 117,4

- Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja)
- Peningkatan unit cost BOS utk Pendidikan Vokasi
- Afirmasi untuk daerah 3 tertinggal, terluar, dan transmigrasi

Dana Insentif Daerah 10,0 8,5

- Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- Mendorong perbaikan iklim investasi di daerah (Kategori kemudahan berusaha)
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Kategori pengelolaan sampah)

Dana Bagi Hasil 104,0 95,9

- Min 50% DBH CHT untuk dukung program JKN
- DBH DR dapat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan perhutanan sosial
- *Sharing* beban bila harga komoditi dan subsidi naik
- Penyelesaian Kurang Bayar DBH pada Triwulan 4
- 25% DTU untuk belanja infrastruktur.

Dana Alokasi Umum 414,9 401,5

- Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah
- Bersifat final untuk memberi kepastian;
- Penguatan afirmasi kepada daerah kepulauan
- **Memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5%, gaji ke 13 dan THR, serta formasi CPNS Daerah;**
- 25% DTU untuk belanja infrastruktur.

Dana Otsus, DTI & Dana Keistimewaan DIY 22,1 21,1

- Pendanaan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Papua & Papua Barat
- Pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Aceh;
- Pendanaan urusan keistimewaan di DIY

Dana Desa 2019: 73,0
2018: 60,0
2015 : 20,8

- Formulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan
- Melanjutkan skema padat karya tunai (*cash for work*)
- Meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat Desa
- Penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa

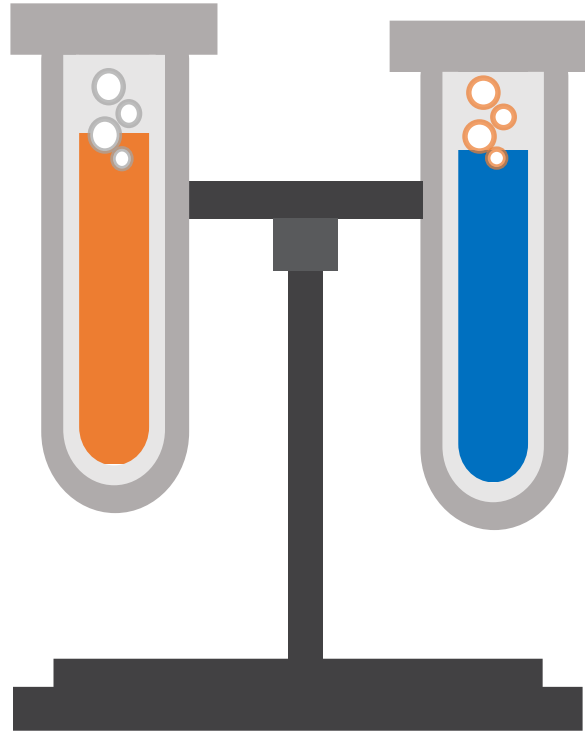
Rata-Rata Per Desa
2019: Rp973,9 juta
2018: Rp800,5 juta
2015: Rp280,0 juta



Pendanaan untuk Program Pembangunan dalam RAPBN 2019 bersumber dari Pajak, PNPB dan Pembiayaan

Pengeluaran Pemerintah Rp2.516,8 T

1. Belanja K/L Rp840,3 T
2. Belanja non K/L Rp767,1
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp832,3 T
4. Pengeluaran Pembiayaan Rp77,1 T

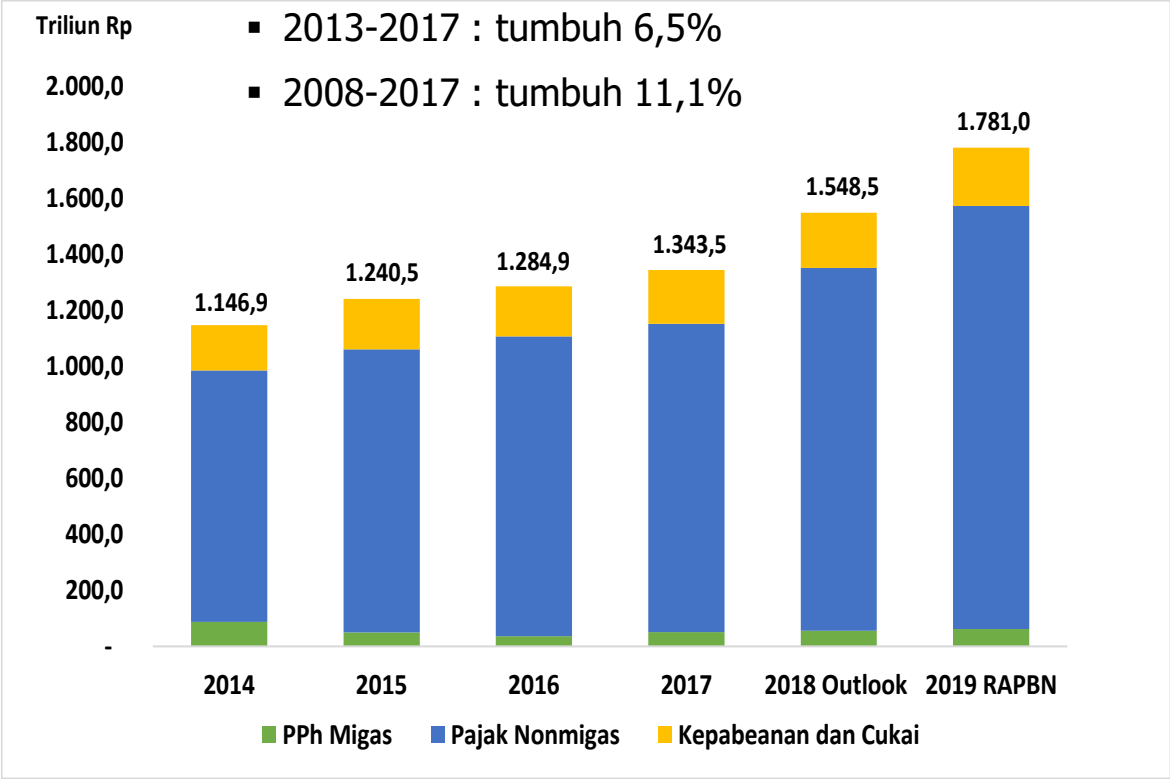


Pendanaan Rp2.516,8 T

1. Penerimaan Perpajakan Rp1.781,0 T
2. PNPB & Hibah Rp361,5 T
3. Pembiayaan Utang Rp359,3 T
4. Pembiayaan Lainnya Rp15,0 T



Penerimaan perpajakan tahun 2019 ditargetkan tumbuh 15,0% dari *outlook* 2018, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir



Dalam RAPBN 2019:

- Target Pajak nonmigas (*excl.* PPh migas) tumbuh 16,6% dari *Outlook* 2018
- Kepabeanan dan Cukai tumbuh 5,6% dari *outlook* 2018

Kebijakan Insentif Pajak

- Tetap memberikan pengurangan pajak untuk mendukung perkembangan sektor tertentu (pionir),
- Pemberian *allowance* pajak untuk mendukung tambahan investasi,
- Pengurangan pajak untuk mendukung kegiatan litbang dan vokasi.

Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin meningkat → menuju kemandirian

dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1% di tahun 2019

Pajak Menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing

Penguatan Pelayanan Perpajakan

- a. simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan
- b. perluasan cakupan *e-filing*, dan
- c. kemudahan restitusi

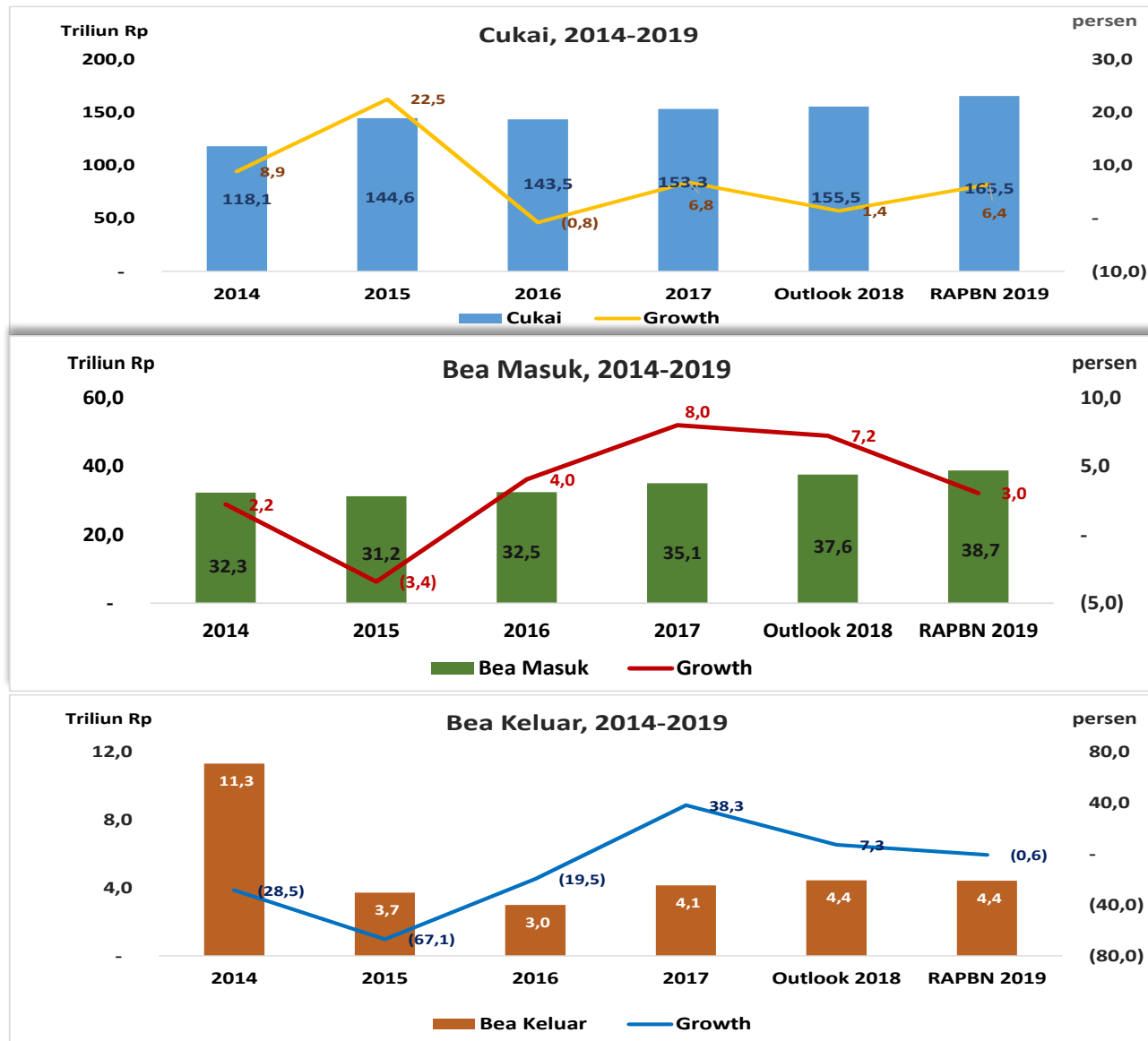
Penegakan Hukum

- a. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara berkeadilan
- b. Peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan

Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

- a. Implementasi AEoI dan akses informasi keuangan
- b. Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca *tax amnesty*
- c. Penanganan UMKM secara *end-to-end* melalui pendekatan *Business Development Services* (BDS)
- d. *Joint Program* DJP-DJBC
- e. Pembenahan basis data perpajakan
- f. Penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko (*Compliance Risk Management /CRM*)

Pertumbuhan target Kepabeanaan dan Cukai tahun 2019 diperkirakan meningkat seiring perbaikan kinerja perdagangan dan meningkatnya harga komoditas...



KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Memperbaiki *dwelling time*, a.l :

- ✓ Percepatan layanan Pusat Logistik Berikat
- ✓ Simplifikasi prosedur impor
- ✓ Pembayaran BM & Pajak 24x7 (dgn MPN G2) → termasuk layanan kepabeanaan 24x7



Melanjutkan **pemberantasan penyelundupan, dan penertiban barang kena cukai ilegal** (rokok, miras)



Penurunan/efisiensi biaya logistik



Melanjutkan **penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi** (PIBT, PEBT dan PCBT) → Sinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan



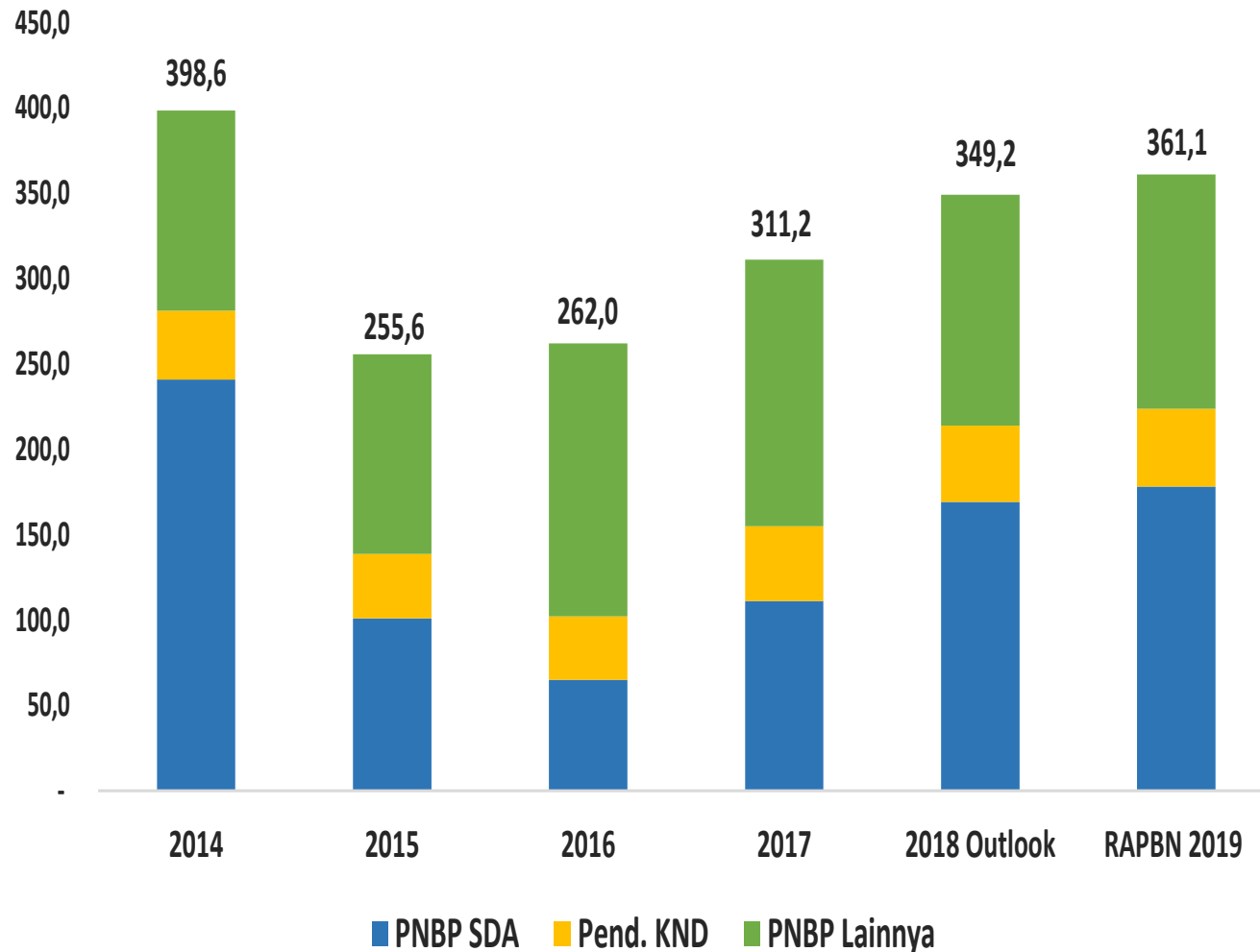
Pengembangan/perluasan fasilitas **kemudahan impor tujuan ekspor** (KITE) untuk **industri kecil dan menengah (IKM)**



Penambahan **barang kena cukai (BKC) baru** (kemasan plastik)

PNBP tahun 2019 ditargetkan tumbuh 3,4% dari *outlook* tahun 2018

PNBP, 2014-2019



KEBIJAKAN UMUM PNBP



Optimalisasi produksi

diikuti upaya **efisiensi biaya** dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha



Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha serta **optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**



Peningkatan dividen BUMN

dengan mempertimbangkan **cashflow BUMN** dan kemampuan keuangan BUMN dengan pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah

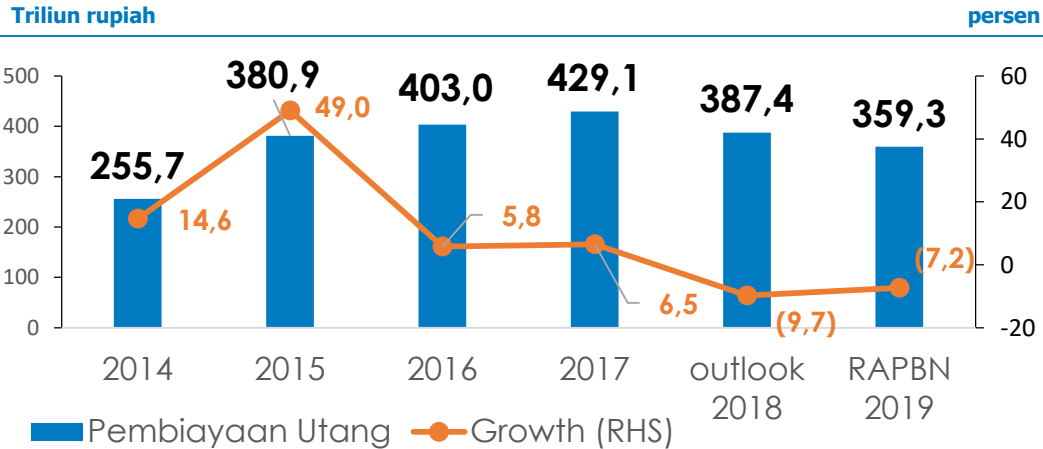


Tindak Lanjut Perubahan UU PNBP

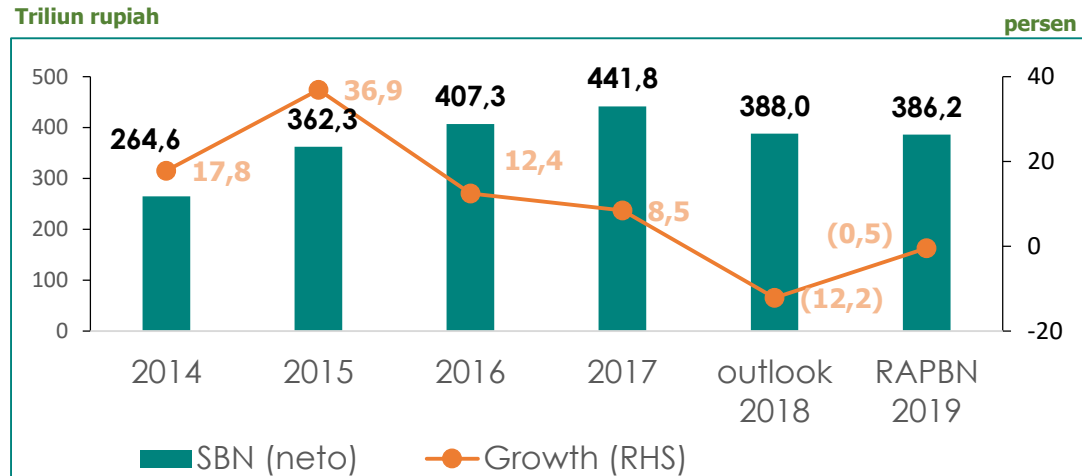
- Penyederhanaan tarif PNBP, khususnya terkait layanan
- Penajaman perencanaan, pelaksanaan & pertanggung jawaban PNBP
- Penguatan pengawasan dan pemeriksaan PNBP
- Rumusan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP

Kesehatan dan Kemandirian dari APBN ditunjukkan dengan Penurunan Pembiayaan Utang dalam 2 tahun terakhir

Pertumbuhan pembiayaan utang cenderung menurun dari tahun 2015, dan bahkan tumbuh negatif di tahun 2018 dan 2019



SBN neto cenderung menurun dari tahun 2017, sementara sukuk yang langsung digunakan membiayai proyek infrastruktur semakin meningkat



Sukuk Proyek

2013 Rp0,8 T
di 2 K/L

2019 Rp28,4 T
di 7 K/L



Tantangan 2019

- Lanjutan kenaikan *Fed rate*
- Penghentian *QE* di Eropa dan Jepang
- Tekanan defisit neraca transaksi berjalan



Strategi Pembiayaan Utang 2019

- Utang diprioritaskan dalam Rupiah agar tetap *resilient* terhadap gejolak nilai tukar
- Potensi investor domestik dioptimalkan untuk pendalaman pasar sekaligus mengendalikan kepemilikan asing



Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

- **Hati-hati**
menjaga rasio utang terhadap PDB.
- **Efisiensi**
 - Menjaga akuntabilitas pengelolaan utang
 - Meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali
- **Produktif**
 - pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;
 - menjaga komposisi utang dalam batas *manageable*;
 - menjaga solvabilitas.

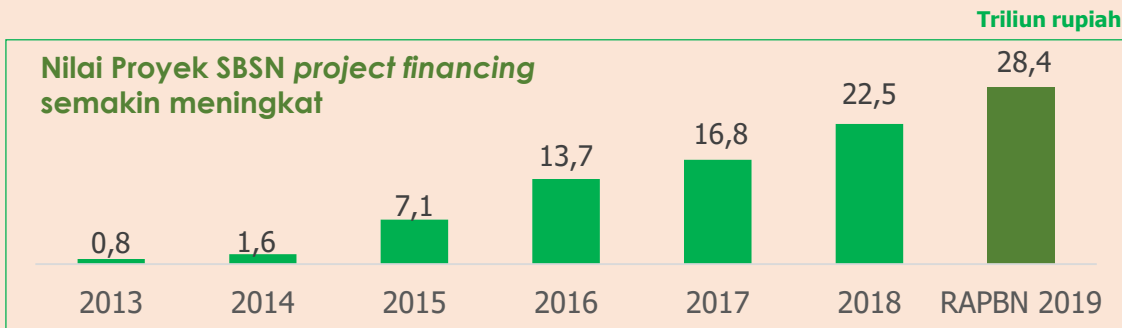
Pembiayaan Utang Mendukung Program Prioritas Pemerintah

- **Infrastruktur Dasar**
- **Pariwisata**
- **Pendidikan**
- **Kesehatan**
- **Kelistrikan**
- **Almatsus, dan Alutsista**

Sukuk Proyek (*project financing sukuk*)

Dalam periode 2013 – 2018, Sukuk proyek telah membiayai proyek infrastruktur antara lain

- Jalur Kereta Api,
- Asrama Haji (40 proyek)
- Jalan dan Jembatan (339 proyek)
- KUA dan Balai Nikah (701 proyek)
- Sarana Pendidikan (98 proyek)
- Sarana dan prasarana Sumber Daya Air (332 proyek)
- Fasilitas taman nasional (3 lokasi)
- 32 Madrasah, dan
- 3 laboratorium penelitian.



Pinjaman Dalam Negeri (PDN)



PDN terutama digunakan untuk mendukung almatsus Polri dan Alutsista TNI

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

PLN kegiatan telah mendukung pembangunan nasional melalui proyek-proyek strategis antara lain:

- Jembatan Suramadu
- Jembatan Tayan
- RS pendidikan di beberapa PTN (antara lain di Universitas Sumatera Utara, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas)
- Waduk Jatigede
- Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di Pulau Sumatera dan Kalimantan
- Pengadaan alutsista dan almatsus (Kapal Perang PKR 105, Pesawat CN-295, dan Kapal Selam).



Suramadu



Jatigede

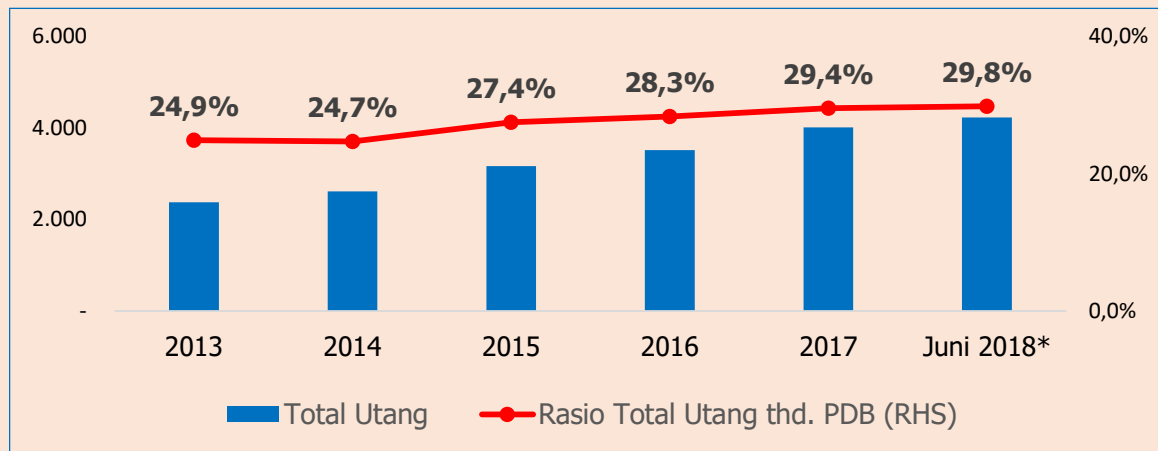
Tahun 2019, PLN kegiatan dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas SDM dan Infrastruktur

- pembangunan sarana prasarana perkuliahan
- Infrastruktur pelabuhan Patimban dan beberapa ruas jalan tol (Solo - Kertosono, Cisumdawu dan Manado – Bitung)
- Infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai DAM, reservoir maupun irigasi.

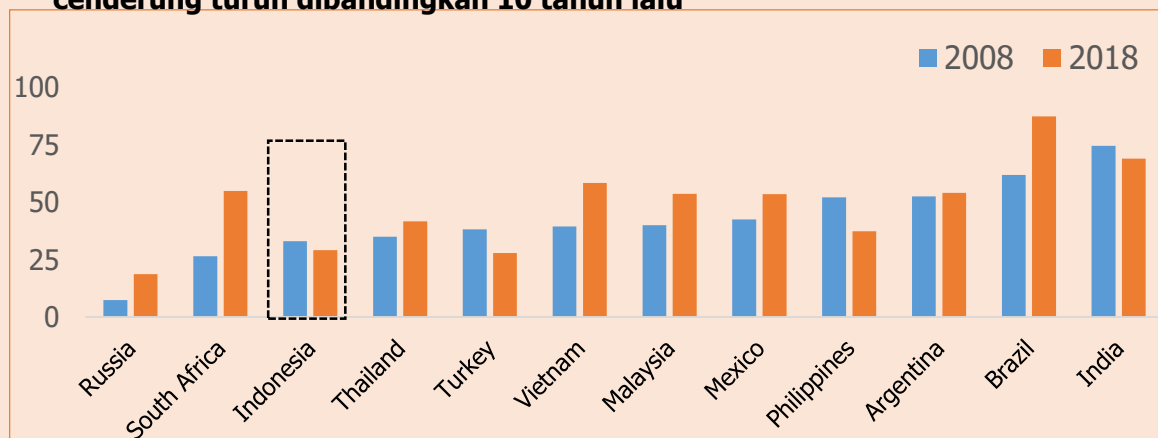
Pembiayaan Utang Mendukung Investasi Pemerintah melalui PMN kepada BUMN dan BLU serta Penerusan Pinjaman

Rasio Utang Terus Dijaga Agar Kestinambungan Fiskal Terkendali

Meskipun rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir namun tetap terjaga dan relatif lebih rendah dari Negara peers

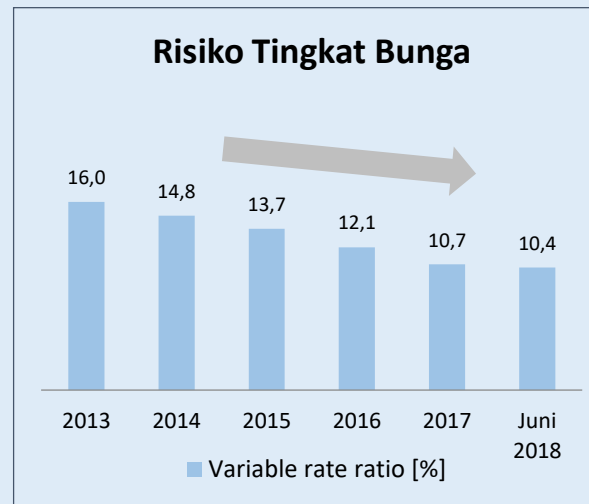


Rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif rendah dan cenderung turun dibandingkan 10 tahun lalu

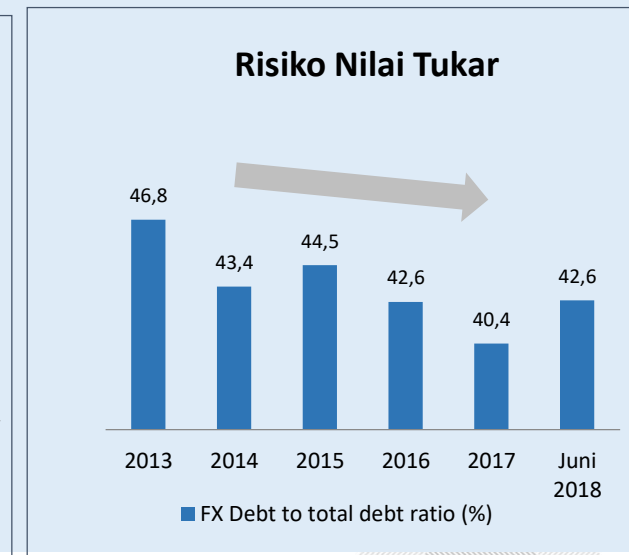
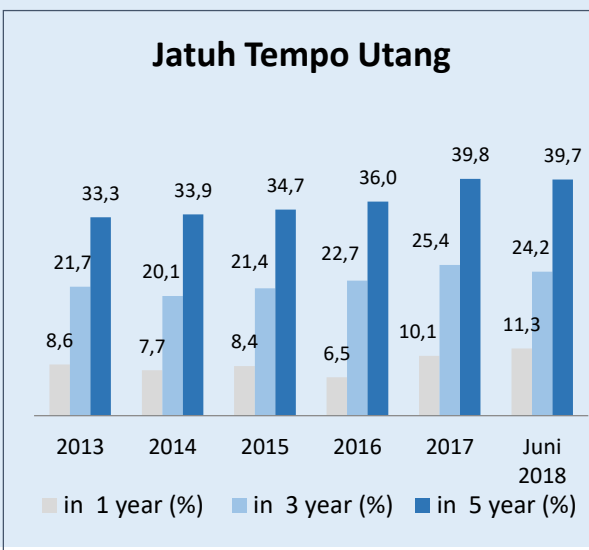


Sumber: World Economic Outlook

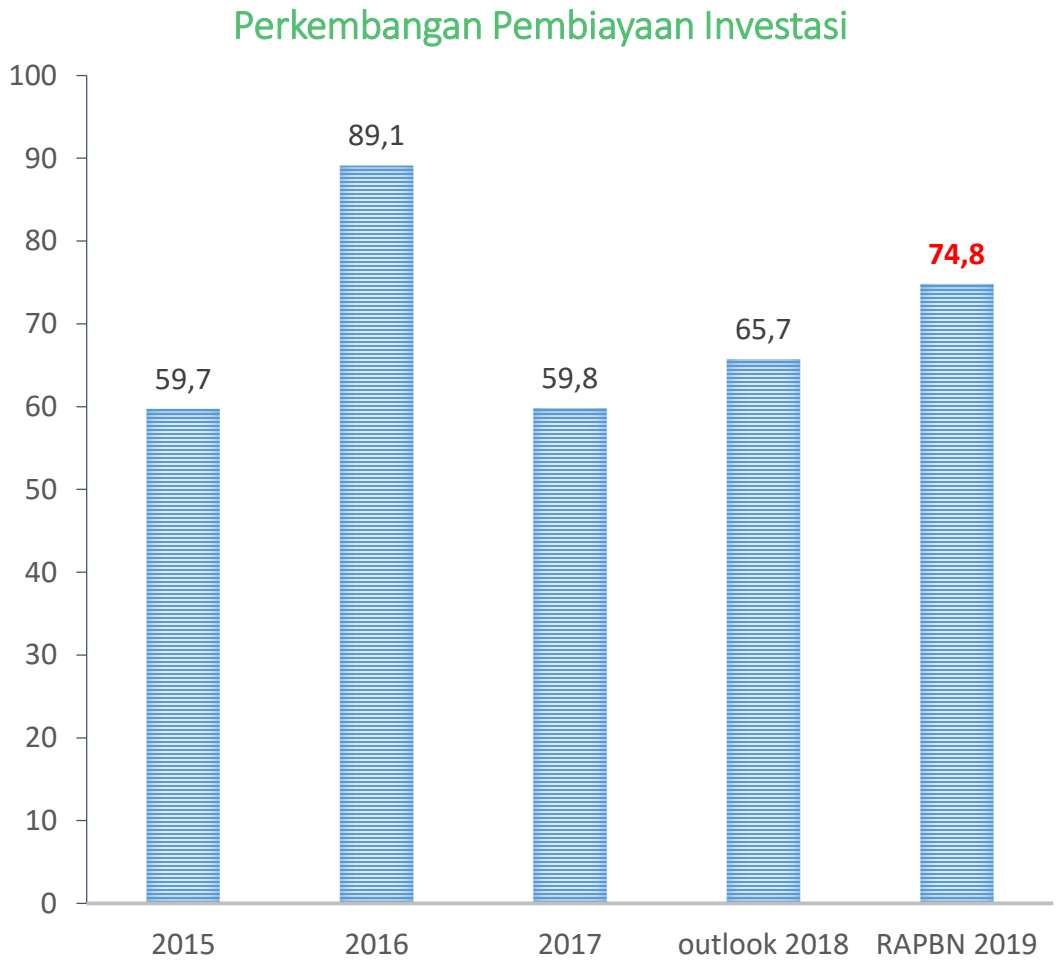
Utang Dikelola Secara *Prudent* Untuk Mendukung Kestinambungan Fiskal



- Mengendalikan utang jatuh tempo sesuai kemampuan membayar kembali untuk meningkatkan kepercayaan pasar
- Mengatur komposisi utang untuk mengendalikan fluktuasi kewajiban utang



Pembiayaan Investasi Tahun 2019 dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan anggaran infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan daya saing ekspor dan peran serta Indonesia di dunia internasional



● 2019 ● 2018 (triliun rupiah)



BLU LMAN : 22,0 35,4
Pembebasan lahan untuk prioritas pembangunan nasional



DPPN : 20,0 15,0
Peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan



PMN kepada LPEI : 2,5 0
Penugasan khusus peningkatan ekspor nasional



PMN kepada BUMN : 17,8 3,6

- PT PLN Rp10 T
Pencapaian target rasio elektrifikasi
- PT Hutama Karya Rp7 T
Penugasan jalan tol trans sumatera
- PT SMF Rp800 M
Dukungan pembiayaan perumahan



BLU PPDPP : 5,2 2,2
Peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR



BLU PIP: 3,0 2,5
Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif



Organisasi/LKI/BUI : 2,3 2,2
Mempertahankan porsi kepemilikan saham dan hak suara Indonesia pada organisasi/LKI



LDKPI : 2,0 1,0
Pengelolaan dana kerjasama pembangunan internasional

Kesimpulan



APBN Sehat, Adil, dan mandiri

Postur APBN yang semakin sehat & mendorong ekonomi
Keseimbangan primer mendekati positif



Penerimaan negara terus dioptimalkan

Tetap menjaga iklim usaha & investasi
Reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan
Optimalisasi pengelolaan SDA dan aset



Prioritas program semakin fokus

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi



Belanja negara lebih efektif dan efisien

Sinergi pusat dan daerah
koordinasi program vokasi, riset, infrastruktur, pariwisata
Percepatan pembangunan infrastruktur dengan dukungan swasta melalui KPBU AP
Penguatan desentralisasi fiskal



Keberpihakan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM dan ultra mikro

Tarif pajak PPh final UMKM hanya 0,5%.
Peningkatan bantuan kepada UMKM dan ultra mikro



KERJA KITA
PRESTASI BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



KERJA KITA
PRESTASI BANGSA



ANNUAL MEETINGS
2018 | Indonesia
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP

PERKIRAAN PERTUMBUHAN PDB 2019 MENURUT PRODUKSI

Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi perlu ditunjang Peningkatan Supply (Produksi) pada sektor-sektor kunci

Pertumbuhan PDB (%)	2016	2017	S1 2018	Outlook 2019
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,4	3,8	4,1	3,8
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	1,5	0,6
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,3	5,1
Konstruksi	5,2	6,8	6,5	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran	4,0	4,4	5,1	5,3
Transportasi dan Pergudangan	7,4	8,5	8,6	8,8
Akomodasi Makan Minum	5,2	5,5	5,6	6,1
Informasi dan Komunikasi	8,9	9,8	7,3	10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,9	5,5	3,7	7,9
PDB	5,0	5,1	5,2	5,3

- Sektor Industri Pengolahan terus didorong sebagai penggerak pertumbuhan. Fokus Industrialisasi diarahkan pada industri unggulan, antara lain: industri pangan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik sejalan dengan roadmap *Making Indonesia 4.0*
- Sektor Perdagangan diperkirakan meningkat seiring daya beli masyarakat yang terjaga serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa domestik serta ekspor-impor
- Sektor Konstruksi tetap konsisten tumbuh tinggi seiring dengan investasi bangunan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- Sektor Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi didukung pembangunan infrastruktur transportasi baru seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, serta beroperasinya moda transportasi baru di kota-kota besar seperti MRT dan LRT
- Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan pencaangan beberapa destinasi wisata baru, serta pemasaran ‘*Wonderful Indonesia*’

Sumber: BPS, Bappenas dan Kementerian Keuangan